

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA MATTAMPAPOLE**

**SKRIPSI**



**LISNAYANTI  
105721117920**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA MATTAMPAPOLE**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**LISNAYANTI**

**NIM: 105721117920**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya  
(Qs. Al-baqarah ayat 286)

### PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karuniannya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, serta orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

### PESAN DAN KESAN

#### PESAN:

“Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi juga tidak ada kerja keras yang sia-sia”

#### KESAN:

“Kuliah itu bukan balap-balapan lulus atau tentang tinggi-tinggian IPK, jalani saja dengan tanggung jawab dan versi terbaikmu”



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mattampapole

Nama Mahasiswa : LISNAYANTI

NIM : 105721117920

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 11 Januari 2025, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Abdul Muttalib, S.E., M.M**  
NIDN: 09001125901

**Faidul Adzim, S.E., M.Si.**  
NIDN: 0921018002

Dekan,  
**Dr. Andi Jam'an SE., M.Si**  
NBM : 651 507

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen

**Nasrullah, SE., M.M**  
NBM : 1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: LISNAYANTI, Nim : 105721117920, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0001/SK-Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 11 Rajab 1446 H / 11 Januari 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Rajab 1446

11 Januari 2025

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
2. Abdul Muttalib, S.E., M.M  
3. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
4. Nasrullah, S.E., M.M

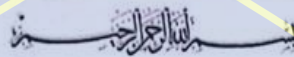
Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 607



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISNAYANTI  
Stambuk : 105721117920  
Program Studi : Manajemen  
Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mattampapole

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan,



**LISNAYANTI**  
NIM : 105721117920

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen

**Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507

**Nasrullah, SE., M.M**  
NBM : 1151 132

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISNAYANTI  
NIM : 105721117920  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mattampapole”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 11 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan,



**LISNAYANTI**  
NIM : 105721117920

## ABSTRAK

**LISNAYANTI. 2024. *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole*. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abdul Muthalib dan Faidul Adziem.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole. 2) Pengaruh pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole. 3) pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Mattampapole dengan jumlah 929 orang. Dalam menetapkan ukuran anggota sampel dari masing-masing anggota populasi dapat ditentukan berdasarkan rumus penentuan ukuran anggota sampel menggunakan rumus Slovin dan didapatkan sampel yang berjumlah 90 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole didapatkan  $t$  hitung sebesar 2,656 dan  $t$  tabel 1,987 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya  $t$  hitung 2,656  $>$   $t$  tabel 1,987 dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , dengan kategori sedang dengan persentase 49,5%. 2) Pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole didapatkan  $t$  hitung sebesar 2,656 dan  $t$  tabel 1,987 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Artinya  $t$  hitung 2,656  $>$   $t$  tabel 1,987 dengan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ , dengan kategori sedang dengan persentase 50,3%. 3) Pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole adalah 51,9%.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.



## ABSTRACT

**LISNAYANTI. 2024. The Effect of Village Fund Allocation and Community Empowerment on Increasing Community Welfare in Mattampapole Village. Thesis for the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Abdul Muttalib and Faidul Adziem.**

This research aims to find out, 1) the influence of village fund allocation on improving the welfare of the people of Mattampapole Village. 2) The influence of community empowerment has an impact on improving the welfare of the people of Mattampapole Village. 3) the influence of village fund allocation and community empowerment on improving community welfare in Mattampapole Village. This type of research is quantitative research. The population in this study was the community in Mattampapole Village with a total of 929 people. In determining the size of the sample members from each member of the population, it can be determined based on the formula for determining the size of the sample members using the Slovin formula and a sample of 90 respondents is obtained. Data collection techniques in this research consist of questionnaires and documentation. The data analysis technique used is descriptive and inferential statistics with the help of SPSS 25.

The results of the research show that: 1) The effect of village fund allocation on increasing community welfare in Mattampapole Village was obtained by t count of 2.656 and t table of 1.987 with a significance value of  $0.001 < 0.05$ . This means that t count is  $2.656 > t$  table 1.987 with a significance value of  $0.001 < 0.05$ , in the medium category with a percentage of 49.5%. 2) The positive and significant influence of community empowerment on improving community welfare in Mattampapole Village was obtained by t count of 2.656 and t table of 1.987 with a significance value of  $0.003 < 0.05$ . This means that t count is  $2.656 > t$  table 1.987 with a significance value of  $0.003 < 0.05$ , in the medium category with a percentage of 50.3%. 3) The influence of village fund allocation and community empowerment on improving community welfare in Mattampapole Village is 51.9%.

**Keywords:** Village Fund Allocation, Community Empowerment, Increasing Community Welfare.

## KATA PENGANTAR

سُبْحَانَكَ يَا رَحْمَنُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul 'Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mattampapole".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Hajar dan Ibu Nurlina yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrullah, S.E., M.M, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidul Adzim, S.E., M.Si, Selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekoomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak meluangkan ilmu kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Hajar, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu me penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Pintu surgaku, Ibunda Nurlina, Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti-

hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Saudariku tercinta Nadia Azzahra yang selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi yang cukup Lelah ini, terimakasih adikku yang sudah menemani proses demi proses sampai di titik sekarang
12. Sahabat penulis Wilda Yuli Asmin dan Anita Fatriani, yang selalu kebersamai peneliti dari awal perkuliahan sampai tugas akhir, Terima Kasih karena telah menjadi rumah kedua untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat support, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semangat untuk tetap berproses.
13. Semua orang yang terlibat dalam kehidupan penulis yang semuanya memberikan Pelajaran baik luka maupun kebahagiaan yang mampu menopang penulis untuk tetap bertahan dan menjalani kehidupan sehingga mampu sampai pada titik ini.
14. Terakhir diri sendiri, terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-Mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

*Billahi Fi Sabilil Haq, Fastabikul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 12 Desember 2024



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBEHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan Penelitian .....	10
D.Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A.Tinjauan Teori .....	11
1.Alokasi Dana Desa .....	11
2.Pemberdayaan Masyarakat .....	28
3.Kesejahteraan Masyarakat .....	43
B.Penelitian Terdahulu .....	51
C.Kerangka Pikir .....	57
D.Hipotesis .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	60
A.Jenis Penelitian .....	60
B.Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
C.Jenis dan Sumber Data .....	61
D.Populasi dan Sampel .....	61

E. Metode Pengumpulan Data .....	62
F. Defenisi Operasional Variabel.....	63
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	65
H. Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	72
B. Hasil Penelitian .....	79
C. Pembahasan .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 3.1	Pengukuran Skala Likert .....	63
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel .....	64
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Alokasi Dana Desa .....	33
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat .....	19
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat .....	29
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Alokasi Dana Desa .....	33
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Pemberdayaan Masyarakat .....	19
Tabel 3.8	Hasil Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat .....	29
Tabel 3.9	Interpretasi Nilai $r$ .....	33
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	79
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	79
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ....	80
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	81
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama .....	82
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan....	82
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Status .....	83
Tabel 4.8	Frequency Data Alokasi Dana Desa .....	84
Tabel 4.9	Deskriptive Statistik Alokasi Dana Desa .....	85
Tabel 4.10	Frequency Data Pemberdayaan Masyarakat .....	85
Tabel 4.11	Deskriptive Statistik Pemberdayaan Masyarakat .....	
Tabel 4.12	Frequency Data Kesejahteraan Masyarakat .....	
Tabel 4.13	Deskriptive Statistik Kesejahteraan Masyarakat .....	87

## DAFTAR TABEL



Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas.....	88
Tabel 4.15 Uji T Alokasi Dana Desa .....	90
Tabel 4.16 Uji F Alokasi Dana Desa .....	91
Tabel 4.17 Hasil Koefesien Determinasi (R) Alokasi Dana Desa .....	92
Tabel 4.18 Uji T Pemberdayaan Masyarakat.....	92
Tabel 4.19 Uji F Pemberdayaan Masyarakat.....	93
Tabel 4.20 Hasil Koefesien Determinasi (R) Pemberdayaan Masyarakat..	94
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat .....	94
Tabel 4.22 Uji T Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.....	96
Tabel 4.23 Uji F Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.....	97
Tabel 4.24 Hasil Koefesien Determinasi (R) Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat .....	98
Tabel 4.25 Analisis Trend Realisasi Anggaran Desa Matampapole Kabupaten Maros 2023-2024.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	58
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Mattampapole .	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun adalah masalah mensejahterakan masyarakatnya, karena tanpa adanya perhatian yang serius maka masalah keterbelakangan ekonomi akan membuat proses pembangunan dan transformasi akan banyak mengalami hambatan dengan timbulnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam usaha memperkecil ketimpangan pembangunan berupa pelaksanaan pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah, yang sesuai dengan fenomena dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menghadapi situasi tersebut masyarakat Indonesia yang terjerumus ke dalam ketimpangan sosial dan ketidakberdayaan dalam hidupnya, maka perlu perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat (Lalira & dkk, 2018:63).

Menanggapi permasalahan tersebut, untuk menciptakan dasar yang kokoh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mendefinisikan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Anne Rufaedah (2019:2) desa yang berkembang dalam berbagai bentuk harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kaya, maju, mandiri, dan demokratis untuk menciptakan landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan tenteram. Berdasarkan Undang-Undang Desa Tahun 2014 membawa misi utama bahwasanya negara berhak melindungi serta memberdayakan desa supaya menjadi kuat dan maju serta mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Tujuan utama dari UU Desa ialah mensejahterakan masyarakat desa juga sekaligus memberdayakan masyarakat desa dengan cara memberi bimbingan serta pelatihan dasar dengan melalui pendamping desa. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya agar dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh tiap individu, kelompok, serta masyarakat yang memiliki kemampuan agar dapat melakukan pilihannya serta dapat mengontrol lingkungan keadaannya agar dapat memenuhi segala keinginannya dan termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berhubungan dengan pekerjaan serta aktivitas sosial dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk upaya pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, prilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat dalam

desa. Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan, karena pada kenyataannya pemberdayaan ialah suatu bentuk usaha yang berkesinambungan agar menempatkan masyarakat membentuk masyarakat yang lebih proaktif dalam menentukan arah serta kemajuan dalam komunitas.

Tugas utama dari pemerintah daerah ialah memberdayakan seluruh pelaku ekonomi rakyat serta menjadikannya sebagai suatu daerah incorporated, yang artinya bahwa segala bentuk peran dari pemerintah pusat haruslah diteruskan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah menggantikan peran pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya iklim usaha yang makin kondusif di daerah. Keberhasilan dari pembangunan daerah juga ditentukan oleh berdasarkan seberapa besar dari pihak pemerintah menaruh perhatian terhadap bidang pemberdayaan masyarakat desa setempat, dan disebabkan karena regulasi tentang peletakan dasar-dasar bagaimana pemerintah dalam desa memanfaatkan semua sumber dari penerimaan desa agar terciptanya bentuk pelayanan prima serta pembangunan ditingkat desa.

Sebagaimana amanat Permendes No. 5 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga terdapat pemenuhan kebutuhan bentuk sarana dan prasarana agar masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik tentunya. Selanjutnya pemberdayaan juga berupa ide serta gagasan yang artinya bentuk kemampuan untuk mengekspresikan dan menyokong bentuk gagasan pada suatu forum atau musyawarah secara bebas dan terbuka tanpa adanya bentuk tekanan. Misalnya, seperti membuat suatu ide ataupun gagasan tentang adanya BUMDes dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan

pembangunan desa yang tujuannya agar memajukan perekonomian dalam desa. Dalam hal memajukan perekonomian dalam desa juga tidak terlepas dengan pemanfaatan melalui indikator potensi dalam desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat itu akan jelas terlihat apabila aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, maka bentuk aktivitas ekonomi inilah yang kedepannya akan memberi masukan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan ialah suatu hal yang diinginkan dan dicapai oleh semua orang, pemerintah baik dari daerah maupun pusat tentunya memiliki bentuk tujuan agar mensejahterakan masyarakat seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945. Tingkat kondisi kesejahteraan juga tidak terlepas dari keberhasilan pada pembangunan yang dilaksanakan dalam desa, dari pembangunan tersebut memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Desa Tahun 2014 dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui penyediaan segala bentuk kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi yang ada dalam desa serta memanfaatkan Sumber Daya Alam serta lingkungan dengan berkelanjutan.

Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain kepala desa yang juga dibantu oleh perangkat desa memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hak dan wewenang yang dimiliki desa untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa (Muslihah, Hilda dan Sriniyati, 2019:86). Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu itu baik berupa uang (anggaran) maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagaimana hal yang telah tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pihak pemerintah melalui dengan anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh sebelumnya di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Mattampapole pada tahun 2023 adalah kekeringan, dan kurangnya air bersih untuk persediaan sehari-hari masyarakat. Desa Mattampapole sudah mengalami kekeringan sejak maret s/d desember 2023 sehingga ribuan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air. Terlebih, air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak mengalir lancar atau bahkan sama sekali tidak mengalir.

Karena seiring berjalanya waktu warga desa Mattampapole ber bulan-bulan mengalami kekeringan yaitu pada bulan maret s/d desember 2023. Sumur sumur yang dimiliki oleh warga pun ikut mengering dan benar-benar tidak ada sumber air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa Mattampapole saat musim kemarau 2023. Kekeringan membuat masyarakat harus benar-benar bertindak efisien terkait penggunaan air. Para warga untuk mencuci di sungai harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 kilometer.

Untuk mengatasi dan membantu warga desa Mattampapole untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pemerintah desa Mattampapole

melakukan strategi yaitu memberikan air bersih kepada masyarakat secara bergilir. Dari bulan maret hingga desember bantuan yang telah di keluarkan oleh desa sendiri sebesar 568 tengki dengan kapasitas 5.000 liter, dan juga ada bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros. Karna terjadi kemarau yang begitu panjang sehingga batuan dari pemerintah kabupaten tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka pemerintah desa Mattampapole melakukan strategi untuk membantu para warga yang sedang krisis air bersih. Sehingga pemerintah desa Mattampapole harus mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa Mattampapole, satu tengki air seharga 120.000 ribu rupiah dengan kapasitas 5.000 liter, maka selama musim kemarau yang di catat dari bulan maret s/d desember pihak pemerintah desa Mattampapole mengeluarkan dana sebesar Rp. 80.040.000. Sehingga dana tersebut bisa dikatakan dana dadakan atau diluar rencana-rencana yang telah di susun oleh pemerintah desa Mattampapole untuk keperluan APBDes. (Sumber: melakukan observasi secara langsung dan menanyakan/wawancara dengan bapak sekretaris desa).

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Pengalokasian dana terhadap desa yang dialokasikan dari Kabupaten/Kota itu berdasarkan jumlah dari desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan dan luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa dipakai tujuannya untuk mendanai bentuk keseluruhan kewenangan pada desa



bersama dengan prioritas untuk mendukung akan program pemberdayaan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa ialah merupakan dorongan terhadap kemandirian masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada daerah, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan didapat dari kabupaten pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Alokasi Dana Desa menjadi dana yang terkonsolidasi untuk pembangunan serta pemberdayaan pedesaan, yang artinya dana dari program pusat serta daerah dapat diintegrasikan dalam DD dan ADD tujuannya agar dana lebih besar.

Alokasi Dana Desa dipakai untuk dapat menganggarkan pada sebagian bentuk program pemerintah dalam desa tujuannya untuk menuntaskan persoalan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelembagaan dalam desa. Alokasi Dana Desa disalurkan tujuannya agar meningkatkan efektif serta efisien dalam penyelesaian permasalahan desa dalam masyarakat. Alokasi dana desa dalam hal ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilihat melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan adanya dana yang begitu besar apabila mampu dikelola dengan baik dan jujur maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan produktifitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa, masyarakat yang inovatif, kemiskinan berkurang dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan dalam hal pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena belum menyesuaikan potensi serta kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa Peulokan sudah sangat baik, itu dapat ketahui melalui pengukuran indikator keadilan ekonomi, demokrasi dan sosial. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan (Desi, 2022:12). Alokasi Dana Desa berpengaruh positif serta signifikan terhadap kesejahteraan dalam masyarakat, yang artinya semakin banyak Alokasi Dana Desa yang dialokasikan maka tentu akan semakin tinggi pula kesejahteraan dalam desa tersebut (Sunu dan Utama, 2019:843). Pada hasil penelitian sebelumnya di salah satu desa, di Kecamatan Bantul, bahwa menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik serta kesejahteraan masyarakat antara sebelum adanya Dana Desa dan setelah diberikan Dana Desa, pemberian Dana Desa oleh pemerintah terdapat dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul (Muslihah et al., 2019:85)

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa yang dialokasikan tujuannya agar meningkatkan efektif serta efisien dalam penyelesaian permasalahan desa di dalam masyarakat. Dengan itu maka peneliti mengangkat dan fokus pada permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat

meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa. Ketertarikan ini juga dikarenakan pada program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dari segi pembangunan, kesehatan, alokasi dana desa maupun dalam segi pemberdayaan lainnya, khususnya di Desa Mattampapole Kecamatan Mallawa dan program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pihak dari pemerintah desa dan juga masyarakat serta diharapkan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijabarkan diatas maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole?.
2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole?.
3. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole?.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole.
3. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini bertujuan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap peneliti sendiri khususnya, dan serta sebagai penambahan referensi daftar bacaan bagi mahasiswa dan juga terhadap pihak-pihak lain terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan atas pengetahuan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa (Ramli et al., 2018:49). Menurut Rahayu (2017:09) pengalokasian dana terhadap desa dari Kabupaten/Kota dengan berdasarkan jumlah tiap desa, serta memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis. ADD digunakan dalam pembiayaan keseluruhan bentuk kewenangan dalam mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Soimin (2019:60) menjelaskan bahwa perhitungan Alokasi Dana Desa sebelumnya disesuaikan dengan keadaan desa yang berdasarkan beberapa kriteria yang diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab secara teknis, baik itu dalam bidang pemerintahan (Mendes PDTT) bersama Menteri Keuangan. Kriteria-kriteria tersebut secara garis besar ialah berdasarkan terhadap perhitungan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan wilayah geografis serta luas wilayah desa. Hal tersebut akan menentukan besaran anggaran Alokasi Dana Desa(ADD) yang didapat, dengan bentuk mekanisme yang berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke dalam daerah serta dilakukan berdasarkan mekanisme pemberian secara bertahap.

Berdasarkan pasal 72 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perhitungan Alokasi Dana Desa, diperkirakan jika pemerintah mampu menggelontorkan pada setiap desa sebesar 10% dari pajak/retribusi/DAU/DBH dan ditambah lagi Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumbangan lain yang sah, tentu setiap desa kemungkinan dapat mengelola dana diatas 1 Milyar per desa. Dari penerimaan Alokasi Dana Desa tersebut, pemerintah desa setempat mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan desa tentang APBDes, digunakan pada belanja sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMDes masa periode enam tahun Kepala Desa yang dilaksanakan melalui RKPDes dalam satu tahun anggaran berjalan, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kepala Desa sebagai belanja desa (Soimin, 2019:61). Belanja desa sebagaimana yang telah ditetapkan pada RKPDes dapat dipergunakan sebagai prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sumarni (2020:78) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa dimaksud agar dapat membiayai program pemerintah dalam desa, tujuannya agar dapat melaksanakan bentuk kegiatan pemberdayaan serta kelembagaan dalam desa.

Dana Desa diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat desa, mulai dari tahapan kesejahteraan. Untuk dapat memperoleh hal tersebut masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan program program-program yang akan didanai dari Alokasi Dana Desa. Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Visi dan Misi serta agenda (Nawa Cita) berfungsi untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

perencanaan serta pemantauan dan evaluasi RPJMN (Muslihah et al., 2019:87).

Dalam UU Desa Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk dapat membina serta mengelola keuangan dalam desa. Pengaturan pada keuangan desa meliputi pengalokasian, penyaluran dan penggunaan serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan dana yang dialokasikan pada APBD. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana desa (ADD) kedalam APBD setiap tahun anggaran, besarnya paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **a. Sumber Alokasi Dana Desa**

Salah satu sumber dari keuangan desa, sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 disebutkan di dalam pengelolaan keuangan desa Alokasi Dana Desa ialah dana yang disalurkan kepada desa, yang mana dana tersebut berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD (Alokasi Dana Desa) ialah merupakan sumber pendapatan terhadap desa yang berasal dari wewenang pihak pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan terhadap desa melalui dana perimbangan setelah dikurangnya Dana Alokasi Khusus (Ramli et al., 2018:50). Alokasi Dana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Perbup (Qanun) pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Desa, merupakan

organisasi terendah dibawah mukim didalam struktur pemerintahan daerah. Desa mempunyai hak, tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pada pembangunan serta membina masyarakat desa setempat. Sebelumnya pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 belum memberikan amanat tentang perimbangan atau alokasi dana terhadap desa secara jelas, kemudian sejak tahun 2001 sejumlah dari pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inovasi untuk melahirkan bentuk kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional dengan jumlah yang lebih besar daripada bantuan keuangan sebelumnya. UU No. 22 Tahun 1999 mengubah konsep bantuan menjadi bagian, yang berarti bahwa tiap desa memiliki hak dalam memperoleh alokasi bagian dana perimbangan yang diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian semakin dipertegas dalam PP No. 72 Tahun 2005 yaitu menyatakan bahwa salah satu dari sumber keuangan desa ialah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh pihak Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan pembagiannya untuk tiap desa. Dengan begitu maka klausul inilah kemudian dijadikan sebagai dasar hukum pada ADD (Alokasi Dana Desa).

Disebutkan bahwa dalam UU No. 22 Tahun 1999 bahwa sumber dari pendapatan desa terdiri dari pada:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), yang meliputi antara lain:
  - a) hasil usaha pada desa;
  - b) hasil kekayaan dalam desa;



- c) hasil dari pada swadaya serta partisipasi;
  - d) hasil dari gotong royong;
  - e) dan lainnya, sumber pendapatan asli desa yang dianggap sah;
- 2) Bantuan pemerintah Kabupaten, antara lain:
- a) bagian perolehan dari pajak serta retribusi daerah;
  - b) bagian dari pada dana perimbangan keuangan pusat
  - c) serta daerah yang diterima dari pihak pemerintah
  - d) kabupaten;
- 3) Bantuan dari pemerintah serta pemerintah provinsi;
- 4) Sumbangan dari pihak ke tiga;
- 5) Pinjaman desa.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa**

Sunu dan Utama (2019:849) mengatakan bahwa salah satu dari bentuk tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan bentuk kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan, di dalam bentuk penggunaan tersebut 30% Alokasi Dana Desa dipakai untuk pembiayaan operasional pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% dipergunakan untuk tujuan pembangunan fisik serta dalam pemberdayaan masyarakat. ADD sangat membantu pihak pemerintah desa agar mewujudkan kebijakan serta pembangunan infrastruktur dan dapat mensejahterakan masyarakat desa yang sebelumnya jauh dari kata sejahtera terhadap pemerintah pusat. Masyarakat saat ini diberikan perhatian khusus dalam hal penghambat proses perubahan masyarakat desa serta pembangunan, Dengan adanya ADD dapat memberikan harapan terhadap masyarakat agar dapat memajukan desa yang

terutama dalam bidang ekonomi yang berbasis masyarakat (Ramli et al., 2018:48).

Elvina dan Musdhalifah (2019:2) mengemukakan bahwa tujuan dari pengalokasian Dana Desa ialah untuk dapat menumbuh dan mengembangkan bentuk dari pelayanan publik pada desa, kesenjangan sosial dan mengentaskan bentuk kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, serta mengatasi segala bentuk dari pada kesenjangan pada pembangunan antar desa. Pengelolaan keuangan atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan segala kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa mulai dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh- tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa menjadi dana yang terkonsolidasi dengan tujuan pembangunan di daerah pedesaan. Maksudnya, yaitu dana dari program pemerintah pusat serta daerah dapat diintegrasikan di dalam Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan begitu dana akan jauh lebih besar (Soimin, 2019:67).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 pada Pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah antara lain:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Menumbuh dan meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5 Tahun 2005 dan No. 21 Tahun 2015:

- 1) Dana Desa diutamakan untuk dapat membiayai pembangunan dalam desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang menjadi tanggung jawab desa.
- 2) Dana Desa diprioritaskan agar dapat membiayai segala bentuk kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan asas dalam masyarakat desa dalam memajukan wirausaha, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan dalam bentuk skala ekonomi setiap masyarakat atau kelompok dalam masyarakat desa.
- 3) Memberikan bentuk pelayanan atau bantuan serta dukungan dalam pemberdayaan untuk Masyarakat miskin, bukan dalam wujud santunan gratis melainkan dengan bentuk dana bergiliran.

- 4) Dana Desa diprioritaskan untuk dapat mendanai segala bentuk kepentingan masyarakat dalam Desa bukan hanya saja orang-orang tertentu.
- 5) Dana Desa diutamakan dalam membangun bentuk sarana dan prasarana (infrastruktur) tujuan untuk bentuk pelayanan dasar, mendukung bentuk transportasi, irigasi dan sanitasi, ketahanan pangan, energi serta pengembangan ekonomi
- 6) Dana Desa diutamakan untuk dapat meningkatkan segala bentuk potensi serta aset budaya dan ekonomi dalam desa.

Alokasi Dana Desa di tiap Kabupaten/Kota banyak memberikan manfaat serta pelajaran berharga terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, sekaligus juga meningkatkan kepemilikan lokal, diantaranya:

- 1) Pengalaman Alokasi Dana Desa telah mendorong terhadap efisiensi pada penyelenggaraan layanan publik dan kesesuaian program dengan skala kebutuhan lokal, juga sekaligus meningkatkan kepemilikan lokal;
- 2) Alokasi Dana Desa mendorong rekonstruksi terhadap makna serta format transfer dana pada pemerintah Supra desa pada desa;
- 3) Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan tujuan besar desentralisasi, yaitu membawa perencanaan daerah lebih dekat terhadap masyarakat lokal. Secara kelembagaan, Alokasi Dana Desa membawa pengaruh terhadap perubahan aspek perencanaan daerah, yaitu muncul pola perencanaan pada desa. dengan begitu maka pola ini semakin mendekatkan pada perencanaan

pembangunan pada masyarakat desa dan juga masyarakat desa akan mempunyai akses yang lebih dekat terhadap perencanaan;

- 4) Alokasi Dana Desa menjadi arena baru terhadap pembelajaran lokal dalam mengelola desentralisasi (Rosidin, 2019:232).

### **c. Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berdasarkan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Disebutkan bahwa berdasarkan siklus pada pengelolaan, dalam UU desa yang meliputi: 1). Perencanaan; 2). Kegiatan Musrenbang Desa yang menyertakan Pemerintah Desa, BPD, serta masyarakat desa dimulai pada tingkat dusun hingga tingkat desa; 3). Pengelompokan dan penyesuaian rencana berdasarkan aturan APBD desa; 4). Penentuan APB desa; 5). Pada pelaksanaan dalam pembangunan menyertakan pihak masyarakat secara swakelola; 6). Pertanggungjawaban, pemerintah harus terbuka dalam penyampaian informasi bentuk laporan pada kegiatan rapat/musyawarah desa; 7). Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Evaluasi ialah salah satu hal yang terpenting untuk dapat mengelola Alokasi Dana Desa. Evaluasi dibutuhkan agar dapat memastikan setiap tahapan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. Adapun bentuk dalam tahapan proses evaluasi dilaksanakan mulai dari tahapan dalam perencanaan hingga laporan

untuk pertanggungjawaban, dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan secara tersusun mulai dari level pusat hingga pada daerah. Tahapan evaluasi pada level pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, beserta dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa serta PDDT. Tahapan proses dalam evaluasi dari pemerintah pusat dilaksanakan secara sinergis serta sistematis. Keadaan tersebut tujuannya untuk memastikan bagaimana penggunaan dana pada desa sesuai dengan yang ditetapkan atau tercapainya output yang maksimal. Pemerintah menetapkan Proses pemberian sanksi apabila dalam memastikannya terdapat adanya penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Muslihah et al., 2019:88).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sewajarnya bisa mencerminkan komitmen dari pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak seharusnya mengorbankan aspek kepentingan publik. Hingga sekarang bentuk pada pembiayaan dalam pembangunan desa masih saja bergantung terhadap pendapatan asli desa serta swadaya masyarakat yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan. Dengan begitu maka dalam memberi dukungan pada wilayah pedesaan pihak dari pemerintah pusat menunjukkan kepada pihak kabupaten agar dapat mengalokasikan dana langsung ke desa yang bersumber dari APBD (Muslihah et al., 2019:87).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwasanya dana perimbangan keuangan dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa di bagikan secara proposional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa dan dana

tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan untuk kepentingan desa sesuai dengan ketentuan berlaku dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014:

- 1) Pemerintah dalam menyelenggarakan Alokasi Dana Desa digunakan sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Alokasi Dana Desa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70 %, Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja operasional desa yaitu dengan membiayai segala kegiatan penyelenggaraan pada desa dengan prioritas sebagai berikut dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pada pembiayaan pembangunan desa, dalam hal pemberdayaan masyarakat, tunjangan BPD, tunjangan aparat desa, untuk operasional pemerintah desa, untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa serta pelayanan publik dalam desa, dan yang utama anggaran Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang berlawanan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 berkenaan Tentang Desa, disebutkan dana perimbangan keuangan pusat serta

daerah yang disalurkan ke Kabupaten/Kota pada tiap pembagiannya terhadap desa secara proporsional atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa harus memperhatikan atau melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD.
- 2) Desa menyusun rencana anggaran.
- 3) Mengajukan program dan anggaran.
- 4) Penyaluran dana ke desa.

Bagi belanja pembedayaan masyarakat dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dll.
- 2) Modal untuk usaha masyarakat melalui BUMD.
- 3) Biaya untuk tujuan pengadaan ketahanan pangan.
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- 5) Teknologi cepat guna.
- 6) Perbaikan kesehatan dan alokasi dana desa.
- 7) Pengembangan sosial budaya.
- 8) Dan sebagian lain yang di anggap penting.

Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan keuangan desa, karena seluruh bentuk kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka bersamaan dengan prinsip untuk rakyat. Pada tujuan untuk mendukung



pelaksanaan serta kelancaran ADD dibentuk kegiatan dalam desa (Ramli et al., 2018:51). Pemerintah supradesa menjembatani bentuk perencanaan yang sudah tersusun, serta memberikan fasilitasi dan penguatan pada perencanaan yang integratif dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, sebagaimana yang telah diwadahi dari berbagai kebutuhan sektoral lokal. Dan sekaligus juga menjadi panduan arah pada pengembangan potensi lokal yang unggul dan khas (Soimin, 2019:67).

Proses penyaluran serta penggunaan Alokasi Dana Desa sering terjadi keterlambatan pencairan pada setiap kabupaten, hal tersebut disebabkan karena lambatnya laporan realisasi akhir tahun yang dibuat serta disusun oleh pihak pemerintah desa untuk dapat diberikan terhadap pemerintah Pusat/Kabupaten sebagai syarat untuk pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya. Keterlambatan penetapan jumlah alokasi oleh pihak pemerintah kabupaten pada perbup serta sosialisasi perbup terhadap desa yang menjadi hak serta wewenang desa yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota. Selanjutnya partisipasi masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa dalam hal pembangunan desa serta pemberdayaan kapasitas dalam desa, kendala yang didapat karena masyarakat tidak mengetahui informasi yang akurat serta sosialisasi mengenai hal penggunaan serta pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa pada pengadaan sosialisasi serta pemberitahuan informasi yang bersifat transparansi terhadap masyarakat yang ada dalam desa (Ramli et al., 2018:50).

Menurut Rosidin (2019:251) pengelolaan keuangan dalam desa ialah termuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pencairan dana ke dalam rekening desa, serta ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa. Pelaporan merupakan suatu mekanisme agar dapat mewujudkan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang ditegaskan dan termuat dalam asas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabel). Rosidin (2019:252) mengatakan bahwa pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa ialah penyampaian bentuk laporan realisasi/pelaksanaan APBDes dengan tertulis oleh pemerintah desa (Kepala Desa) terhadap Bupati atau Walikota yang berdasarkan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya pada perundang-undangan yang terbagi dalam dua tahap, antara lain:

- 1) Pelaporan semester pertama disampaikan kepala desa terhadap bupati atau walikota paling telat akhir bulan juni pada tahun berjalan;
- 2) Pelaporan semester kedua atau laporan akhir, yang disampaikan kepala desa terhadap bupati atau walikota paling telat akhir bulan januari pada tahun selanjutnya.

Tahap selanjutnya pelaporan pertanggungjawaban ialah bentuk laporan realisasi tentang pelaksanaan APDes disampaikan oleh kepala desa terhadap Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir 31 Desember pada tiap tahunnya. Pelaporan pertanggungjawaban yang

dilakukan kepala desa paling telat akhir bulan januari tahun selanjutnya, ditetapkan berdasarkan Perdes dengan disertakan lampiran berikut:

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi tentang pelaksanaan APBDes yang berdasarkan dengan form yang telah ada;
- 2) Laporan kekayaan yang ada milik desa;
- 3) Laporan tentang program sektoral serta program daerah yang masuk ke desa (Rosidin, 2019:253).

Dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya disampaikan terhadap pihak pemerintah yang berwenang saja, akan tetapi pertanggungjawaban juga disampaikan terhadap masyarakat desa, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pertanggungjawaban secara langsung disampaikan kepada masyarakat dengan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD (Badan Pengawas Daerah) serta unsur masyarakat yang lainnya. Laporan pertanggungjawaban secara langsung juga dapat disebar luaskan dengan melalui sarana informasi, serta komunikasi, yang berupa website resmi pemerintah kabupaten ataupun website pemerintah desa, atau papan informasi desa. Pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan yang telah ditetapkan APBDes wajib agar diinformasikan dengan cara tertulis terhadap masyarakat desa dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat lainnya.

Maksud utama dari pemberian informasi ialah masyarakat dapat mengetahui tentang hal-hal apa saja yang ada dan berkaitan dalam kebijakan realisasi pelaksanaan APBDes. Maka dengan begitu masyarakat dapat memberikam saran, masukan dan koreksi terhadap

pihak pemerintah desa (Rosidin, 2019:254). Pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban merupakan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa aspek yaitu: hukum, administrasi, maupun moral. Hal tersebut bisa terpenuhi apabila asas dari pengelolaan keuangan pada desa dapat diwujudkan dengan benar (Rosidin, 2019:254).

#### **d. Implementasi Alokasi Dana Desa**

Dengan adanya Alokasi Dana Desa masyarakat dalam desa dapat belajar dalam mengurus segala kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya terdorong untuk semakin percaya diri serta mandiri dalam pembangunan desa. Dengan begitu semestinya segala bentuk kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa terlebih dahulu direncanakan, selanjutnya dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat setempat (Ramli et al., 2018:46). Pada perencanaan program pembangunan dalam desa terdapat sisi positif dan negatif. Dari segi positif, partisipasi perencanaan ialah program yang telah direncanakan bersama, sedangkan dari segi negatif ialah terdapat pertentangan serta menghambat pada pencapaian keputusan bersama. Bentuk partisipasi secara langsung pada perencanaan pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan pada masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar akan sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, dilakukan dengan sistem perwakilan (Rosidin, 2019:177).

Bentuk dukungan pada pelaksanaan tugas serta fungsi dalam desa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dalam segala bentuk aspek yang sesuai dengan

kewenangan yang didapat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa diberikan wewenang terhadap pemerintah untuk dapat mengalokasikan Dana Desa. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah pada daerah tentu harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dengan begitu maka peran dari pemerintah haruslah menyediakan bentuk prasarana yang mendukung dalam kegiatan yang terutama pada sisi regulasi serta anggaran. Dan pihak pemerintah sebaiknya dapat mengurangi pola pendekatan yang sifatnya intervensi, akan tetapi juga dengan mengedepankan pada pendekatan rekognisi terhadap emansipasi lokal, serta mengoptimalkan terhadap pendekatan fasilitasi pada lembaga kemasyarakatan dalam desa. Pendekatan fasilitas diperlukan agar dapat memperkuat sistem yang ada dalam desa (Soimin, 2019:54).

Pencairan Alokasi Dana Desa sangatlah berpengaruh terhadap penyusunan APBDes yang telah diusulkan dari masing-masing desa, hal ini sesuai sebagaimana telah disesuaikan pada peraturan Bupati/Walikota. Pada penyusunan APBDes terdapat dua sumber dana yang ada dalam pembiayaan pembangunan, pertama sumber dana terdapat pada pemerintah pusat yang disalurkan terhadap desa yang berupa Alokasi Dana Desa, transfer Dana Desa dari pemerintah sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan memperhatikan formula sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Kedua, Dana Desa berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang berasal dari sharing Kabupaten/Kota

ini yang disebut sebagai ADD (Alokasi Dana Desa). ADD dimaksud bertujuan agar mendorong dalam pelaksanaan bentuk pelayanan pada masyarakat dalam desa secara maksimal serta diperuntukkan pada operasional perangkat (Ramli et al., 2018:47)

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau dalam bahasa Inggrisnya *Empowerment* secara harfiah yaitu pemberkuasaan atau pemberdayaan atau juga dapat diartikan yaitu sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberdayaan terhadap masyarakat yang lemah. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pemberian wewenang terhadap jejeran bawah (Ramli et al., 2018:29). Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai upaya bentuk pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, perilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat dalam desa (Soimin, 2019:31). Dalam UU Desa dijelaskan bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa (masyarakat) agar menjadi kuat, maju dan mandiri serta demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Menurut Rosidin (2019:70) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, kemajuan serta kesejahteraan dengan berdasarkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan harkat

dan martabat masyarakat desa, atau dengan istilah lain dapat di pahami sebagai memampukan serta memandirikan masyarakat desa. Sedarmayanti (2013:280) mengemukakan bahwa secara harfiah istilah kata pemberdayaan bisa didefinisikan keadaan lebih berdaya dibanding sebelumnya, baik itu dalam wewenang dan tanggungjawab, serta kemampuan yang dimiliki. Istilah empowerment merupakan kondisi perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, membantu dalam hal menciptakan keadaan lingkungan yang mana setiap dari individu dapat mempergunakan kemampuan dan energinya dalam mencapai tujuan dalam organisasi, dengan begitu sehingga dengan pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon yang baik, dengan begitu maka segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat serta fleksibel.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa pemberdayaan desa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, prilaku dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya yang melalui dengan penetapan program dan kebijakan, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai berdasarkan esensi masalah serta prioritas akan kebutuhan masyarakat desa setempat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan agar memampukan desa di dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan pada tata kelola dalam pemerintahan dalam desa, kesatuan dalam tata kelola ekonomi dan lingkungan, serta bentuk kesatuan tata kelola pada lembaga masyarakat desa dan adat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan

oleh pihak Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Permusyawaratan Desa, BUMDes, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, serta kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk guna mendukung segala kegiatan dalam pemerintahan serta pembangunan yang pada umumnya.

Berdasarkan Permendagri RI No. 7 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat (8) Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah suatu strategi yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat dalam upaya agar mewujudkan kemampuan serta kemandirian dalam bermasyarakat, dan berbangsa. Pemberdayaan yaitu sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya potensi, dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok. Soimin (2019:71) konsep pada pembangunan menitikberatkan terhadap keberdayaan masyarakat pada pendekatannya manusia sebagai subyek pembangunan. Pergeseran paradigma pembangunan dapat mempengaruhi pola pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan terhadap strategi pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Berdasarkan penjelasan di atas pemberdayaan yaitu merupakan proses pencapaian status mandiri menuju peningkatan kekuatan, kemampuan terus-menerus agar tidak mengalami kemunduran, menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang serta mengembangkan kemampuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Mulai dari bidang sosial,



ekonomi, agama dan budaya sehingga masyarakat di desa tidak tertinggal jauh dari masyarakat maju yang berada di kota.

**a. Manfaat dan Tujuan Pemberdayaan**

Sumaryadi (2005:79) mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah membantu mengembangkan manusiawi dengan otentik serta integral pada masyarakat miskin dan lemah untuk dapat diberdayakan kelompok pada masyarakat itu, dengan berdasarkan sosio ekonomis agar dapat mandiri, serta dapat memenuhi akan kebutuhannya. Sedarmayanti (2013:289) mengatakan manfaat pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai sumber daya manusia terhadap bermacam sumber lain yang mensinergikan pada segala bentuk proses dalam kegiatan organisasi, oleh sebab itu perannya yaitu:

- 1) Sebagai suatu alat dalam manajemen untuk memberdayakan berbagai sumber dan mencapai akan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai perbaikan manajemen untuk tujuan meningkatkan pada kinerja organisasi.
- 3) Sebagai inisiator pada organisasi untuk tujuan memanfaatkan suatu peluang guna meningkatkan serta mengembangkan pada organisasi.
- 4) Sebagai mediator akan pihak lain untuk tujuan meningkatkan pada kinerja organisasi.

Menurut Rosidin (2019:76) arah dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat dalam desa yang mandiri dan sejahtera dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim agar memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*), yang merupakan titik tolaknya ialah pengenalan tiap manusia dalam masyarakat, tiap masyarakat agar mendapat potensi yang bisa dikembangkan. Yang artinya bahwa tidak ada orang-orang dalam masyarakat yang tidak memiliki daya, karena disebabkan manusia tanpa mempunyai daya akan punah. Pemberdayaan yang merupakan upaya untuk dapat membangun dan mengembangkan daya itu sendiri serta mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap akan potensi yang ada dan berupaya untuk dapat dikembangkan.
- 2) Untuk memperkuat potensi yang ada pada tiap masyarakat (*empowering*) yaitu dengan upaya dan langkah-langkah yang positif, disamping menciptakan suasana dan iklim. Penguatan pada sisi ini meliputi langkah yang nyata serta menyangkut berbagai penyediaan masukan (*input*), serta akses peluang yang menjadikan masyarakat tetap berdaya.
- 3) Perlindungan pada proses pemberdayaan. Melindungi yang berarti suatu upaya dalam mencegah akan terjadinya keadaan persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat pada yang lemah. Yang tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah memandirikan masyarakat dalam desa serta memampukan dan membangun segala kemampuan agar dapat memajukan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

## b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan merujuk terhadap kemampuan seseorang dan khususnya kelompok yang rentan serta lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan antara lain:

- 1) Terpenuhi akan kebutuhan dasarnya sehingga dari mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artiannya bukan hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan juga bebas dari kelaparan dan bebas terhadap kebodohan, serta bebas terhadap kesakitan;
- 2) Menjangkau segala sumber produktif yang mengharuskan mereka bisa meningkatkan pendapatannya serta memperoleh akan barang dan jasa yang diperlukan;
- 3) Kegiatan partisipasi dalam proses pembangunan serta kepuasan yang mempengaruhi terhadap mereka (Ramli et al., 2018:31).

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yaitu: pertama, pendekatan yang bersifat terarah atau dapat dipahami sebagai langkah pemberdayaan terarah, yang berpihak pada masyarakat miskin; kedua, pendekatan bersifat kelompok, yaitu secara bersama dalam melakukan pemecahan bentuk masalah yang dihadapi; ketiga, pendekatan berdampingan yaitu selama dalam proses pembentukan serta penyelenggaraan dalam kelompok di masyarakat miskin mesti didampingi oleh pihak pendamping profesional sebagai fasilitator dan komunikator serta dinamisor pada kelompok yang tujuannya agar mempercepat pencapaian dalam kemandirian masyarakat (Ramli et al, 2018:30). Menurut Rosidin (2019:79) dikatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan terhadap

kebutuhan dari masyarakat serta peraturan yang berlaku pada masyarakat desa, yang berlandaskan dari norma serta nilai yang berlaku pada tiap masyarakat, sehingga dengan begitu dapat menggerakkan partisipasi pada masyarakat untuk lebih berdaya.

Mengacu pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa, yang menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan serta strategi meliputi dalam bidang pemberdayaan antara lain:

- 1) Memberi bentuk pelatihan usaha ekonomi serta dalam bidang pertanian, perdagangan, serta perikanan;
- 2) Memberi pelatihan dalam bidang teknologi tepat guna;
- 3) Dal hal alokasi dana desa, pelatihan, serta penyuluhan terhadap perangkat desa, dan kepala desa;
- 4) Peningkatan kapasitas terhadap masyarakat, antara lain:
  - a) Kader Pemberdayaan masyarakat desa,
  - b) Kelompok usaha ekonomi yang produktif,
  - c) Kelompok perempuan,
  - d) Kelompok masyarakat miskin,
  - e) Kelompok tani,
  - f) Kelompok nelayan,
  - g) Kelompok pengrajin,
  - h) Kelompok pemerhati serta perlindungan anak,
  - i) Kelompok pemuda,
  - j) Kelompok lainnya berdasarkan kondisi desa.
  - k)

### c. Konsep Pemberdayaan

Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum* yang berarti sesuatu yang dapat dimengerti. Konsep ialah abstraksi yang berupa ide serta gambaran yang dinyatakan pada suatu kata ataupun symbol. Maka dapat dimengerti bahwa secara konseptual, istilah kata pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Mulanya konsep pemberdayaan timbul daripada penguatan modal sosial dalam masyarakat/kelompok yang meliputi dalam penguatan modal sosial (Ramli et al., 2018:30). Menurut Rosidin (2019:70) konsep dalam pemberdayaan mencakup pada pengertian pembangunan yang bertumpu terhadap pembangunan (*community development*), pada tahap berikutnya timbul istilah *community driven development* yang artinya pembangunan yang digerakkan dari pihak masyarakat desa.

Pada konsep utama yang terdapat dalam pemberdayaan itu sebagaimana memberikan kesempatan yang luas as-sirah adab masyarakat untuk dapat menentukan akan arah kehidupan dalam komunitasnya. Pada dasarnya konsep pemberdayaan ditekankan pada perolehan bentuk ketrampilan, kekuasaan dan pengetahuan yang cukup dalam kehidupan (Ramli et al., 2018:31). Menurut Rosidin (2019:71) pemberdayaan meliputi atas tiga pokok utama, yaitu pengembangan (*enabling*), (*empowering*) upaya agar dapat memperkuat potensi atau daya, serta terciptanya kemandirian masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan, akan

tetapi juga terhadap masyarakat yang mempunyai daya yang terbatas, sehingga dapat dikembangkan agar dapat mencapai kemandirian pada tiap masyarakat.

Sedarmayanti (2013:282) menyebutkan bahwa munculnya suatu konsep pemberdayaan pada mulanya ialah suatu gagasan yang ingin menempatkan posisi dari manusia sebagai subjek dari dunianya, maka dengan itu wajar saja konsep ini menampakkan terhadap dua kecenderungan antara lain:

- 1) Pertama, pemberdayaan ditekankan terhadap proses terhadap memberi atau mengalihkan terhadap kekuasaan serta kekuatan serta kemampuan (*power*) terhadap masyarakat, organisasi ataupun individu tujuannya agar lebih berdaya. Kemudian proses ini sering dikatakan sebagai kecenderungan primer terhadap makna pemberdayaan.
- 2) Kedua, kecenderungan sekunder menekankan terhadap proses pada stimulasi untuk mendorong serta memotivasi terhadap individu agar mempunyai kemampuan serta keberdayaan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan sendirinya.

Menurut Soimin (2019:71) konsep pembangunan yang menitikberatkan terhadap keberdayaan sosial dalam masyarakat pada pendekatannya dilakukan manusia sebagai subyek yang diakui maupun tidak yang berpengaruh pada kemajuan perekonomian. Dijelaskan juga bahwa terdapat program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada perubahan paradigma pembangunan dalam menunjang kesejahteraan, diperlukan tiga hal antara lain:

- 1) Aspek kelembagaan sosial di masyarakat yang diakomodasi dalam tiap perencanaan pembangunan daerah setempat.
- 2) Aspek budaya lokal (*local community*) seperti bentuk karakteristik dari struktur sosial ataupun budaya yang sudah melekat pada masyarakat yang harus dipandang sebagai bentuk kekuatan.
- 3) Kebijakan pembangunan yang dilahirkan oleh pihak pemerintah setempat tentu dapat diadaptif bersamaan dengan pola kehidupan masyarakat, yang artinya bentuk kebijakan yang dilahirkan haruslah partisipatif serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengelolaan anggaran.

Menurut Rosidin (2019:79) dasar utama tentang pemikiran pemberdayaan masyarakat ialah mengedepankan kemampuan pada masyarakat agar bisa mengelola dengan mandiri segala urusan dalam masyarakat. Program pemberdayaan pada masyarakat termuat dalam proses Perdes (Peraturan desa) yang pada dasarnya dilakukan oleh setiap warga desa serta berhak untuk menyampaikan masukan, saran, pendapat baik secara tertulis maupun lisan, kemudian akan dibahas pada musyawarah desa (Musdes). Pentingnya peran dalam Musdes pada penyusunan Perdes, maka dalam mekanisme penyampaian aspirasi dari masyarakat seperti:

- 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan segala informasi yang mencakup tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam desa;
- 2) Setiap dari masyarakat desa berhak mendapatkan bentuk perlakuan yang adil serta sama, baik dalam menyampaikan

aspirasinya dengan melalui para wakil yang terpilih maupun yang bergabung untuk mewakili unsur dalam masyarakat desa;

- 3) Setiap dari masyarakat bebas pada intimidasi serta tekanan pada penyampaian pendapatnya, baik itu sebelum proses ataupun setelah proses dalam Musdes (Musyawarah desa).

Musdes (Musyawarah desa) diselenggarakan oleh pihak dari Permusyarawatan Desa dan bersama dengan pemerintah desa. Badan Permusyarawatan Desa dibentuk agar dapat melaksanakan fungsi legislasi pada tingkat pemerintahan dalam desa, yang fungsinya sebagai wadah untuk masyarakat dengan tujuan aspirasi pada semua permasalahan ataupun usulan terhadap pemerintah desa. Pemberdayaan desa yang berdampak dalam menghadirkan ketahanan masyarakat serta mensyaratkan tentang budaya untuk ketaatan hukum pada tiap masyarakat (Rosidin, 2019:81).

#### **d. Indikator Pemberdayaan**

Prayitno (2014:24) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses belajar mengajar yang terencana serta sistematis yang dilakukan dengan berkesinambungan baik dari pihak individu ataupun kolektif yang tujuan dan indikatornya mengembangkan daya (potensi) seperti halnya memanfaatkan potensi dalam desa. serta kemampuan yang ada pada dalam diri individu maupun kelompok untuk dapat dikembangkan. Bersamaan pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan suatu proses dalam peningkatan kekuatan dan kemampuan serta menciptakan bentuk kemandirian dalam masyarakat. Maka dengan adanya potensi yang terdapat dalam



masyarakat dapat berkembang sehingga masyarakat bisa bersaing dengan masyarakat luar lainnya. Dorongan pemberdayaan masyarakat konsisten dilakukan pihak pemerintah agar terwujudnya kemandirian dalam masyarakat juga dalam hal pembangunan yang utama pembangunan pada tingkat desa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013:446) proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi manusia untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya dengan memberi dorongan, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat akan potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, adapun upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf alokasi dana desa, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
- 3) Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh karena kurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

Secara garis besar, menurut Rosidin (2019:72) pemberdayaan masyarakat ialah bentuk usaha serta upaya agar dapat memandirikan serta menyejahterakan masyarakat desa. Maka upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Bina manusia merupakan semua bentuk kegiatan yang termasuk pada upaya penguatan serta pengembangan kapasitas, yaitu:
  - a) Pengembangan kapasitas pada tiap individu di masyarakat, yang meliputi pada kapasitas kepribadian dan kapasitas pada dunia kerja
  - b) Pengembangan bentuk kapasitas entitas atau kelembagaan yang terdiri: pengembangan pada jumlah serta mutu sumber daya; interaksi antarindividu di dalam organisasi; kejelasan visi dan misi serta budaya organisasi; bentuk interaksi bersama entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pihak lain.
  - c) Pengembangan serta kapasitas sistem (jejaring) yang terdiri: pengembangan bentuk interaksi dengan entitas atau organisasi pada luar sistem; pengembangan bentuk interaksi antarentitas (organisasi) pada suatu sistem yang bersamaan.
- 2) Bina usaha yang berperan serta memegang aspek tiap pemberdayaan, karena dapat memberikan dampak serta manfaat penting terhadap kesejahteraan.
- 3) Bina lingkungan ialah terpenuhi segala kewajiban yang ditetapkan pada persyaratan investasi serta operasi yang berkaitan terhadap

perlindungan, pemulihan (rehabilitasi atau reklamasi) sumber daya alam serta lingkungan hidup, pelestarian.

4) Bina Kelembagaan dapat diartikan yaitu pranata sosial ataupun organisasi sosial yang apabila terpenuhinya atas empat komponen antara lain:

- a) Kepentingan, merupakan orang-orang yang telah terikat oleh tujuan serta kepentingan sehingga mereka akan harus saling berinteraksi bersama;
- b) Person, merupakan orang-orang yang terlibat dan berperan pada suatu kelembagaan serta dapat diidentifikasi keadaan dengan jelas;
- c) Aturan, bahwa setiap dari kelembagaan dapat mengembangkan pada seperangkat kesepakatan yang dipikul secara bersama, dengan begitu maka seseorang dapat menduga perilaku orang lain pada suatu lembaga;
- d) Struktur, merupakan setiap dari orang yang memiliki posisi serta peran yang dapat dijalankan dengan benar, dengan begitu maka seseorang tidak bisa mengubah posisinya dengan kemauannya.

Pemberdayaan masyarakat memfasilitasi terhadap proses belajar sosial yang berhubungan terhadap seluruh praktik pembangunan pada tingkat komunitas. Pengungkapan fasilitas dimaksud diberikan dari pendamping desa, masyarakat desa terfasilitasi untuk belajar serta mampu mengelola segala bentuk kegiatan pembangunan dengan mandiri. Beragam bentuk pelatihan serta kegiatan capacity building

diberikan terhadap masyarakat serta dikelola langsung oleh masyarakat desa (Soimin, 2019:221).

Terdapat peluang yang besar dalam mendukung pemberdayaan serta kemandirian masyarakat desa dengan melalui pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes ialah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk serta dimiliki oleh pihak pemerintah dalam desa, serta dikelola dengan mandiri dan ekonomis serta profesional berdasarkan modal keseluruhannya dari kekayaan desa yang dipisahkan (Rosidin, 2019:238). BUMDes pada kegiatannya bukan hanya berorientasi dalam hal keuntungan saja, tetapi juga berorientasi dalam memberi dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Soimin, 2019:70). Tujuan utama dari BUMDes ialah memajukan perekonomian dalam desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rosidin, 2019:239). Pada sisi lainnya pihak pemerintah desa juga harus mampu berfikir kreatif serta inovatif untuk mendominasi bentuk kegiatan ekonomi dalam desa dengan melalui BUMDes, tujuannya agar dapat membangun perekonomian desa untuk menciptakan lapangan kerja baru terhadap masyarakat dalam desa, serta menghasilkan barang dan jasa dalam desa.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

Pada UU 1945 pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah memiliki maksud dan tujuan mensejahterakan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu antara lain dengan melalui pembangunan, maksud serta tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

pemerintah memiliki upaya antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan. Hal yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan dari UU Desa yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat dengan memberi bimbingan serta pelatihan (Soimin, 2019:38). Idealnya, regulasi tentang kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa menyangkut terhadap aspek yaitu: tata kelola pemerintahan dalam desa; kewenangan serta kedudukan pemerintah desa; pembangunan dan keuangan dalam desa (Soimin, 2019:39).

Kesejahteraan adalah bentuk keadaan yang terdapat unsur keamanan, keadilan, ketertiban, ketentraman, kemakmuran serta kehidupan yang tertata terdapat tujuan yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga terdapat keadilan dalam setiap dimensi yang ada dalam masyarakat. Keadaan yang aman akan membentuk suatu dimensi pada sosiologi dan psikologi terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Kondisi kehidupan yang terasa tentram, mandiri dan bebas terhadap rasa takut dalam menghadapi akan keadan yang akan dilalui kedepan (Soetomo, 2014:47). Menurut Soimin (2019:74) kemandirian masyarakat desa merupakan suatu alat serta jalur (*roadmap*) agar tercapainya kesejahteraan masyarakat desa setempat. Kemandirian masyarakat dalam desa dipengaruhi terhadap karakteristik dari masyarakat, mulai dari tingkat alokasi dana desa serta kemampuan ekonomi (Rosidin, 2019:82).

Menurut Fahrudin (2012:54) kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang mana seseorang itu dapat terpenuhi kebutuhannya, baik dari kebutuhan pokok dimulai dari makanan hingga kebutuhan primer seperti pakaian serta tempat tinggal yang layak dan air yang bersih, serta

berkesempatan agar dapat melanjutkan alokasi dana desa dan juga mendapat pekerjaan yang tepat supaya bisa menunjang hidup dengan lebih baik sehingga kehidupannya terbebas dari berbagai kesenjangan sosial seperti kemiskinan, kebodohan atau khawatir sehingga kehidupannya menjadi damai baik secara lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat pada menengah kebawah bisa diperkirakan pada tingkat hidup masyarakat dan tingkat hidup yang ditandai dengan jauhnya kata dari kemiskinan dan tingkat kesehatan yang lebih baik serta kemampuan perolehan sekolah yang tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat yang baik.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan material, kebutuhan spiritual, serta kondisi warga negara agar mendapat hidup yang layak serta maupun mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dikatakan dengan kebutuhan material ialah suatu kebutuhan materi seperti sandang, pangan, sekunder dan tersier. Pada UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang baik serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan dengan berkelanjutan.

Konsiderans Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa merupakan suatu upaya guna meningkatkan taraf hidup serta kehidupan menjadi sejahtera, kehidupan masyarakat, mendiami kawasan

pedesaan sebagai hajat di dalam menghidupi kehidupan. Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang terdapat kegiatan dalam bidang pertanian dan juga termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam yang berdasarkan susunan atas fungsi kawasan dengan posisi sebagai area pemukiman pedesaan dan pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi pada masyarakat (Soimin, 2019:71).

Menurut Soimin (2019:72) terkait kesejahteraan terhadap masyarakat mencakup dua komponen utama, yaitu bentuk penyediaan layanan dasar, seperti sandang, pangan, alokasi dana desa serta kesehatan; dan kedua, pengembangan ekonomi dalam masyarakat pedesaan dengan mempertimbangkan potensi desa yang ada. Dengan begitu maka kesejahteraan masyarakat desa yang optimal tentu saja tidak mungkin terlibat oleh pihak pemerintah supradesa saja, tetapi juga dibutuhkan bentuk dukungan dari pihak masyarakat lainnya serta juga pemerintah desa sebagai peran subyek terhadap pembangunan pedesaan. Selanjutnya bentuk dukungan kebijakan dari pemerintah pusat serta daerah tentunya sangat diperlukan, yang terutama dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan program terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Rosidin (2019:255) mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan melalui penyediaan kebutuhan dasar, seperti pembangunan dibidang sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan terhadap Sumber Daya Alam serta lingkungan. Dengan demikian UU

menggunakan dua pendekatan, yakni membangun desa dan desa membangun diintegrasikan pada perencanaan pembangunan desa.

#### **a. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat**

Adapun tujuan dari peningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan anggaran dalam dana desa sebagaimana telah disusun. Pada implementasi kebijakan yang ada, pembangunan dapat dikerjakan berdasarkan rencana yang telah disusun oleh aparat desa bersama dengan masyarakat (Elvina dan Musdhalifah, 2019:3).

Fahrudin (2012:55) mengatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan antara lain:

- 1) Agar tercapainya kehidupan sejahtera, maksudnya tercapainya kehidupan ke arah yang lebih baik.
- 2) Agar dapat menyesuaikan diri kearah lebih baik, khususnya bersama dengan masyarakat didalam suatu lingkungan, agar terciptanya taraf hidup sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Rahman (2018:63) pembangunan kesejahteraan menjadi salah satu solusi agar dapat mengatasi bentuk ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pentingnya perencanaan serta strategi pembangunan kesejahteraan di bidang sosial agar konsep dari kesejahteraan yang berbasis historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan akan berjalan dengan baik dan maksimal.



## b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Nasikun (1993:128) konsep kesejahteraan bisa dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- 1) Adanya jati diri (identity)
- 2) Bentuk Kebebasan (freedom)
- 3) Adanya Kesejahteraan (welfare)
- 4) Adanya rasa aman (security)

Menurut Soetomo (2014:48) terdapat 3 pokok indikator kesejahteraan antara lain:

- 1) Keadilan terhadap ekonomi, menyimpan beberapa indikator yaitu sumber pendapatan dan pekerjaan.
- 2) Keadilan terhadap demokrasi menyimpan beberapa indikator antara lain: keterlibatan musyawarah masyarakat desa.
- 3) Keadilan dalam sosial, menyimpan beberapa indikator yaitu kesehatan, kaitan dalam posyandu dan pemberian gizi anak.

Menurut Soimin (2019:41) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup masyarakat yang baik serta upaya dalam penanggulangan kemiskinan dalam desa dapat dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan pemenuhan serta kebutuhan dasar masyarakat,
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa setempat,
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada dalam desa,
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.

### c. Langkah Dalam Mencapai Kesejahteraan

Menurut Soimin (2019:23) mengatakan bahwa Musdes (musyawarah desa) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan yang ada dalam desa dengan melalui:

- 1) Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam desa;
- 3) Pengembangan ekonomi lokal yang ada dalam desa;
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan berkelanjutan;
- 5) Pembangunan desa dengan mengedepankan kebersamaan dalam desa, secara kekeluargaan, dan gotong royong agar terwujudnya keadilan sosial dalam desa.

Peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan desa dapat dilihat melalui tujuan antara lain:

- 1) Memajukan perekonomian dalam desa;
- 2) Meningkatkan pelayanan publik dalam desa;
- 3) Memperkuat antar masyarakat dalam desa yang sebagai subjek dari pembangunan;
- 4) Mengatasi bentuk kesenjangan pembangunan antar desa (Ramli et al., 2018:33).

Menurut Rahman (2018:65) strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan cara melalui bidang kesehatan, melakukan sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat dengan teknik pendekatan partisipatif, yaitu masyarakat dilibatkan pada program pemerintah seperti keterlibatan sosialisasi dalam upaya pola

hidup sehat, bentuk pelatihan keperawatan dalam keluarga, serta bentuk pelatihan teknologi pertanian yang modern, dan lain sebagainya. Pendekatan secara partisipatif melalui pelayanan kesehatan yang utama dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya di masyarakat atau yang disebut dengan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang meliputi polindes, posyandu, POD (Pos Obat Desa).

Menurut Sumarni (2020:82) dalam mencapai puncak kesejahteraan masyarakat desa tidaklah mudah, diperlukan program untuk dapat dijalankan. Salah satu program yang dilakukan ialah program Alokasi Dana Desa yang merupakan suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah agar dengan cepat menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Terdapat langkah-langkah dalam pencapaian hal tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas dalam masyarakat serta kelembagaan;
- 2) Sistem pembangunan partisipatif;
- 3) Peningkatan fungsi serta peran pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kuantitas serta kualitas bentuk sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

#### **d. Upaya Mencapai Kesejahteraan**

Gischa (2021:84) dilansir pada situs resmi Kementrian Alokasi dana desa dan Kebudayaan Indonesia terdapat beberapa upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu:

- 1) Menciptakan bentuk program dalam mewujudkan suatu desa beserta masyarakat akan kesadaran tentang kesehatan, gizi serta

pola hidup sehat dan bersih baik dalam keadaan jasmani maupun rohani;

- 2) Pengembangan dan peningkatan dalam bentuk kreativitas masyarakat pada memanfaatkan Sumber Daya Alam;
- 3) Memperkuat akan ketahanan sosial serta budaya dalam masyarakat yang berdasarkan nilai leluhur dan budaya lokal;
- 4) Menata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib serta taat akan hukum dan harmonis.

Menurut Soimin (2019:74) kemandirian desa merupakan arah agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperlukan perangkat demokrasi serta desentralisasi desa sebagai pendukung agar terwujudnya kemandirian masyarakat desa. Demokrasi memungkinkan sumber daya desa yang berpihak terhadap masyarakat desa, sedangkan desentralisasi maksudnya memungkinkan alokasi sumber daya terhadap desa. Dengan begitu maka, hak desa agar dapat mengelola Sumber Daya Alam merupakan modal utama terdapat perkembangan ekonomi dalam desa. Sunu dan Utama (2019) mengatakan bahwa upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, pemerintah mempunyai kebijakan dan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, baik berupa bantuan langsung tunai, maupun bentuk jaminan kesehatan dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Dan kedua, pemberian bantuan yang ditujukan kepada pihak masyarakat menengah

kebawah yaitu berupa pengurangan biaya operasional sekolah dan pelayanan kesehatan yang baik.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan empiris / penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain. Maka dalam tinjauan pustaka ini mencantumkan referensi jurnal yang terbaru sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Feiby Vencentia Tangkumah dan Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah (Vicky et al., 2022)	Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa 2022	Dana Desa, perencanaan, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, peningkatan ekonomi	primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparat pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.	(Kusumawardani & Alfiah, 2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan) 2022	Alokasi dana desa, kesejahteraan masyarakat desa	regresi berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
3.	(Karimah et al., 2020)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) 2020	keuangan desa, pemberdayaan, desa	kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya
4.	Mutia Sumarni (Sumarni, 2020)	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 2020	Pengelolaan dana desa dan tingkat kesejahteraan	analisis regresi linier sederhana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R <sup>2</sup> adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel

					independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 %.
5.	Ardiansyah, Muh Syukri, Idha Sari, Nurjannah (Ardiansyah et al., 2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat 2020	Alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat	regresi linear sederhana dengan uji t	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
6.	Desi Riska Ramaza (2022)	Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan 2022	Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan dalam hal pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena belum menyesuaikan potensi serta kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat

					dalam bidang pembangunan Desa Peulokan sudah sangat baik, itu dapat ketahui melalui pengukuran indikator keadilan ekonomi, demokrasi dan sosial.
7.	(Fathony et al., 2023)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung 2023	Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Regresi Linear Sederhana, Korelasi, Determinasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung dan alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung.
8.	Hadyratul Musfirah	Pengaruh Alokasi Dana	Alokasi Dana Desa,	penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini



	(2022)	Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) 2022	Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Syariah		adalah terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai thitung (4,502) > ttabel(1,287) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, semakin baik penggunaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala.
9.	Mahfudz (Mahfudz, 2020)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa 2020	Dampak ADD, efektivitas DD, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan desa	sekunder dan primer	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa banyak peraturan tentang ADD yang tidak dilaksanakan dengan baik menurut hukum yang ada. Sebagian besar orang lebih suka ADD dengan

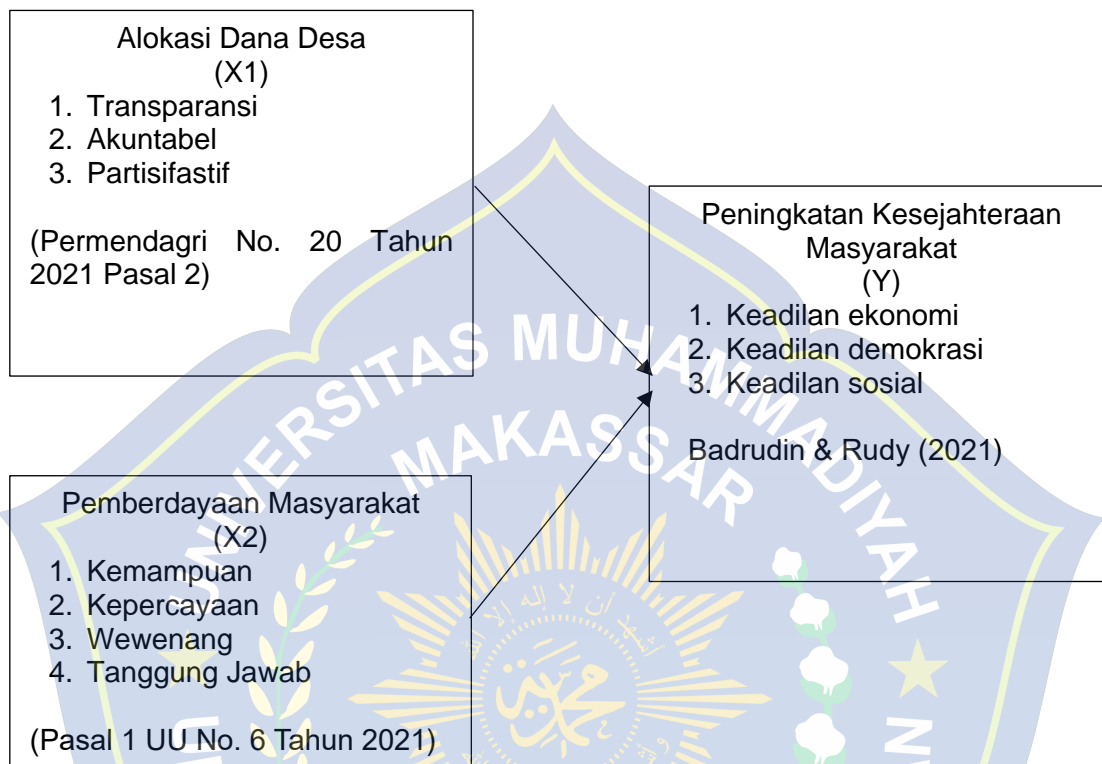
					jumlah yang berbeda untuk masing-masing desa mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, aksesibilitas desa, potensi dimiliki oleh masing-masing desa, dll.
10.	Ainul Yusna Harahap (Harahap, 2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang) 2021	Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat	Linier Berganda dengan bantuan SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber : (Data diolah, 2024)

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir mengenai pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Mattampapole. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (Tiga) variabel yaitu 2 (Dua) variabel independen dan 1 (Satu) variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu alokasi dana desa (X1), pemberdayaan masyarakat (X2) sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). Secara skematis dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut:

### Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis statistic. Hipotesis menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variable independen dan variabel dependen.

Hipotesis dapat berbentuk hipotesis nol (*null hypothesis*) dan hipotesis alternatif (*alternative hypothesis*). Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel independen dan

variabel dependen, sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H01 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Mattampapole.

Ha1 = Terdapat terdapat pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Mattampapole.

H02 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Mattampapole.

Ha2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Mattampapole.

H03 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole.

Ha3 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana Menurut Sugiyono (2019:63). Penelitian kausal bermanfaat guna menganalisa pengaruh diantara satu variabel dengan berbagai variabel yang lain. Jenis penelitian ini diambil karena peneliti menjelaskan hubungan signifikan yang timbul dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian serta menghubungkannya dengan kondisi perusahaan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:64). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antar variabel terkait sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain, alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh, data tersebut akan diolah menggunakan aplikasi statistik kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk diambil suatu kesimpulan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan di desa Mattampapole, kecamatan Mallawa, kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90563. Estimasi waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu selama dua bulan setelah ujian proposal.

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, menurut Moleong (2014:157) data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli pada lapangan dan sumber data yang didapat berasal dari kata-kata serta tindakan. Data Primer merupakan data yang diperoleh pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta didapat secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti menyebarkan angket (*kuesioner*) kepada 50 responden. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang didapat dengan cara tidak langsung terhadap peneliti yang berupa dokumentasi laporan atau catatan tertulis.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan dari masyarakat Desa Mattampapole. Jumlah penduduk di Desa Mattampapole berjumlah 929 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah 451 jiwa dan penduduk perempuan dengan jumlah 478 jiwa dengan jumlah aparat desa 21 orang yang termasuk kedalam jumlah penduduk.

#### 2. Sampel

Menurut Erlina (2020:90) sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Samsunie (2018:23) sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Adapun dalam menetapkan ukuran anggota sampel dari masing-masing anggota populasi dapat ditentukan berdasarkan rumus penentuan ukuran anggota sampel oleh Slovin (Samsunie, 2018:23) dengan tingkat

kesalahan ( $e$ ) yang dapat ditolerir yakni 10% atau 0,1. Berikut adalah rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Sampel

$N$  = Populasi

$e$  = Tingkat kesalahan yang ditolerir

Merujuk pada rumus penarikan sampel yang digunakan, dapat diketahui jumlah sampel dari jumlah populasinya yang sebanyak 929 orang, berikut uraiannya:

$$\begin{aligned} n &= \frac{929}{1+(929)(0,1)^2} \\ &= \frac{929}{10,29} \\ &= 90,2 = 90 \end{aligned}$$

Sebagaimana dari hasil penarikan jumlah anggota sampel melalui penggunaan rumus Slovin di atas terhadap jumlah anggota populasi yang telah ditetapkan, jadi sampel dalam penelitian ini adalah 90 orang.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (*Kuesioner*) adalah pengumpulan data dengan cara memberikan atau mendistribusikan beberapa pernyataan untuk responden agar dapat menjawab daftar peranakan terse but (Umar H, 2013:75). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan/pernyataan mengenai Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Mattampapole kecamatan Mallawa.

## 2. Skala Pengukuran

Untuk mengukur variable pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan interval 1 sampai 5 dengan kriteria yang disajikan dalam tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert**

Jawaban	Keterangan	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Hadyratul, 2022)

### F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu batasan-batasan yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel peneliti itu sendiri sehingga variabel penelitian tersebut dapat diukur. Variabel merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan dependen.

1. Variabel independen (X) Dalam bahasa Indonesia variabel independen atau dikenal dengan variabel bebas. Variabel variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019:64). Variabel independen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Variabel dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat, disebabkan adanya variabel independen (Sugiyono, 2019:64). Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan Masyarakat.



Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi yang memperlihatkan adanya keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat dengan indikator: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial (Badrudin & Rudy, 2021)	Likert 1-5
Alokasi Dana Desa (X <sup>1</sup> )	Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2021 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Dengan indikator: transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Likert 1-5
Pemberdayaan Masyarakat (X <sup>2</sup> )	Berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2021 Tentang Desa, dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, prilaku dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya yang melalui dengan penetapan program dan kebijakan, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai berdasarkan esensi masalah serta prioritas akan kebutuhan masyarakat desa setempat, dengan indikator: Kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.	Likert 1-5

## G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan proses uji validitas instrumen melalui rumus korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas instrumen melalui teknik *Split Half* yang dianalisis dengan rumus *Spearman Brown*.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut (Sugiyono, 2019:82) valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang semestinya diukur. Validitas dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian ini untuk melakukan proses validitas digunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*. Berikut adalah rumus korelasi *Pearson Product Moment*.

$$R_{xy} = \frac{N \sum x_1 x_2 y - (\sum x_1 x_2) (\sum y)}{\sqrt{N \sum x_1 x_2 y - (\sum x_1) (\sum x_2) (\sum y)} \sqrt{\{N \sum x_1 x_2 - (\sum x_1)^2 (\sum x_2)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi r pearson

N : Jumlah sampel/observasi

X1 : Variabel bebas/variabel pertama

X2 : Variabel bebas/variabel kedua

Y : Variabel terikat/ variabel kedua (Muri, 2020:372)

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai t hitung

r : Koefisien korelasi hasil

r : hitung

n : Jumlah responden (Sugiyono, 2019:82)

Untuk mempermudah proses pengumpulan data dan perhitungan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan program aplikasi IBM *SPSS Statistics* 25. Uji ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 untuk uji dua arah. Kriteria dalam pengujian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (pada taraf signifikansi 5%), maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Alokasi Dana Desa**

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Alokasi Dana Desa (X1)	X1.1	0,718	0,1975	0,000	Valid
	X1.2	0,774	0,1975	0,000	Valid
	X1.3	0,735	0,1975	0,000	Valid
	X1.4	0,603	0,1975	0,000	Valid
	X1.5	0,792	0,1975	0,000	Valid
	X1.6	0,746	0,1975	0,000	Valid
	X1.7	0,553	0,1975	0,000	Valid
	X1.8	0,706	0,1975	0,000	Valid
	X1.9	0,715	0,1975	0,000	Valid
	X1.10	0,554	0,1975	0,000	Valid
	X1.11	0,718	0,1975	0,000	Valid
	X1.12	0,774	0,1975	0,000	Valid
	X1.13	0,735	0,1975	0,000	Valid
	X1.14	0,603	0,1975	0,000	Valid
	X1.15	0,792	0,1975	0,000	Valid

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

**Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat**

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat (X2)	X2.1	0,739	0,1975	0,000	Valid
	X2.2	0,717	0,1975	0,000	Valid
	X2.3	0,786	0,1975	0,000	Valid
	X2.4	0,796	0,1975	0,000	Valid
	X2.5	0,885	0,1975	0,000	Valid
	X2.6	0,770	0,1975	0,000	Valid
	X2.7	0,757	0,1975	0,000	Valid
	X2.8	0,732	0,1975	0,000	Valid
	X2.9	0,861	0,1975	0,000	Valid
	X2.10	0,830	0,1975	0,000	Valid
	X2.11	0,739	0,1975	0,000	Valid
	X2.12	0,717	0,1975	0,000	Valid
	X2.13	0,786	0,1975	0,000	Valid
	X2.14	0,796	0,1975	0,000	Valid
	X2.15	0,885	0,1975	0,000	Valid

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

**Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y.1	0,851	0,1975	0,000	Valid
	Y.2	0,835	0,1975	0,000	Valid
	Y.3	0,864	0,1975	0,000	Valid
	Y.4	0,855	0,1975	0,000	Valid
	Y.5	0,685	0,1975	0,000	Valid
	Y.6	0,829	0,1975	0,000	Valid
	Y.7	0,851	0,1975	0,000	Valid
	Y.8	0,835	0,1975	0,000	Valid
	Y.9	0,864	0,1975	0,000	Valid
	Y.10	0,855	0,1975	0,000	Valid

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi, dalam mengungkapkan gejala tertentu. Pada penelitian uji reliabilitas menggunakan rumus *Spearman Brown*.

Berikut adalah rumus *Spearman Brown*:

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Keterangan:

$r_i$  : Reliabilitas internal seluruh instrument

$r_b$  : Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua (Sugiyono, 2019:82)

Uji reliabilitas pada penelitian ini juga dihitung menggunakan program aplikasi IBM *SPSS Statistics 25*. Untuk menguji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini dengan melihat besaran nilai *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

**Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Alokasi Dana Desa**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Alokasi dana desa (X1)	0,882	Reliabel

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasanya, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,876 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Pemberdayaan Masyarakat**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Pemberdayaan masyarakat (X2)	0,873	Reliabel

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasanya, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,873 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y)	0,925	Reliabel

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasanya, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,925 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel.

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *software SPSS versi 25*, dengan cara memasukkan hasil dari operasionalisasi variabel yang akan diuji. Adapun analisis data yang digunakan enelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Uji Normalitas

Normalitas dihitung untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasikan untuk populasi penelitian. Analisis normalitas data menggunakan rumus *One-Sample Kolmogorov-Smirnov SPSS for Windows*. Pengambilan keputusan normal atau tidaknya data diputuskan dengan melihat nilai *observe* (observasi) dengan nilai *expected* (harapan atau ideal). Jika nilai *Asymp Sig*  $> 0,05$  maka disimpulkan data yang diuji mempunyai distribusi normal. Sebaliknya,  $< 0,05$  maka dapat mempunyai distribusi yang tidak normal.

##### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan terhadap model lebih dari satu variabel bebas, untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Peningkatan kesejahteraan masyarakat

a = Bilangan konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi alokasi dana desa

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi pemberdayaan masyarakat

X<sub>1</sub> = Alokasi dana desa

X<sub>2</sub> = Pemberdayaan masyarakat

e = Faktor Kesalahan

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Apakah nilai thitung > nilai ttabel dengan tingkat signifikan 5% (α = 0,05). Itu berarti kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel dependen, dengan melihat nilai-nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variabel independen mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis

secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila  $F_{hitung} >$  dari nilai  $F_{tabel}$ , maka variabel bebasnya secara simultan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 90\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

$R^2$  = Kuadrat Koefisien Kolerasi

Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian akan diolah dengan metode regresi berganda, untuk menguji pengaruh variabel independen (variabel bebas) yaitu alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole, maka dilakukan pengelompokan atau 5 kriteria penilaian yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun interpretasi nilai r adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.9 Interpretasi Nilai r**

No	Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
1	0,00 – 0,1990	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,000	Sangat Tinggi

(Sumber: Sugiyono, 2016).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Deskripsi Desa Matampapole

Desa Mattampapole adalah terdiri dari dua kata yaitu Mattampa (memanggil dan Pole (Dating) jadi Mattampapole artinya Dating Memanggil. Nama Mattampapole itu sendiri diberikan oleh seseorang kerajaan mallawa yang berkuasa pada saat itu (1888-1900) yaitu toleang daeng mahatang , cerita tentang mattampapole itu berasal dari seamparan areal persawahan yang pada waktu itu dikerjakan bersama sama pada waktu itu masyarakat sangat sangat kekurangan bahan makanan terutama padi karena penjajah belanda pada waktu itu sangat membatasi kepemilikan lahan pertanian bagi warga pribumi, maka dengan adanya areal persawahan yang di namai dengan mattampapole ini menjadi sumber penghidupan bagi warga Mallawa, dan dari situlah nama areal persawahan menjadi nama Desa Mattampapole.

Desa Matampapole adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Mattampapole berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swakarsa. Luas desa Mattampapole adalah 11,61 km<sup>2</sup> dengan perbandingan 4,92% dari luas keseluruhan Kecamatan Mallawa atau 0,72% dari luas keseluruhan Kabupaten Maros. Desa Mattampapole memiliki jumlah penduduk sebanyak 827 jiwa dengan 42 tingkat kepadatan penduduk sebanyak 71,23 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017. Jarak desa ini dari ibu kota Kecamatan Mallawa yaitu Ladange adalah 5

km. Kata Mattampapole berasal dari bahasa Bugis, yang terdiri atas kata mattampa (membayar) dan kata polé (pulang). Penggabungan kedua kata tersebut melahirkan makna "membayar pulang". Desa Mattampapole terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 300 mdpl.

Beberapa lokasi pada jarak orbitasi atau pusat pemerintahan dari Desa Mattampapole adalah sebagai berikut: Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan (Ladange): 5 k, Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten (Turikale): 66 km dan Jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar): 96 km.

Desa Matampapole memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan Desa Batu putih, sebelah selatan berbatasan Kelurahan Sabila, sebelah Barat berbatasan Desa Tellumpanuae dan Desa Uludaya sedngkan sebelah timur berbatasan Desa Poleonro (Kecamatan libureng, Kabupaten Bone). Desa matampapole tiga wilayah pembagian adminstrasi daerah tingkat V berupa dusun yaitu: Dusun Bulu-bulu, Dusun Jampue, Dusun Palacari.

## **2. VISI, MISI Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.**

Visi :

Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros memiliki Visi yaitu:

**"MATAMPAPOLE YANG LEBIH MAJU 2025"**

Sementara Misi dari Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yaitu:

Misi :

- 1) Pembangunan Insprasturktur Transportasi sebagai penopang utama pembangunan Ekonomi Desa.
- 2) Pembangunan/pengadaan sarana penunjang pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai piral utama pembangunan desa.
- 3) Perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan secara massip dengan memotivasi dan manfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada di Desa Matampapole seluas-2.000 Ha.
- 4) Perkembangan ekonomi produktif melalui pengoptimalan Bumdes, Pasar Desa dan kelompok ekonomi masyarakat lainnya.
- 5) Pengembangan peternakan [ternak besar, kecil] dengan mengadopsi system peternakan yang terkini dan lebih baik.
- 6) Melakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan professional tentang perkembangan Desa/Ekonomi kreatif yang nantinya menghasilkan inofasi Desa.
- 7) Pengembangan generasi mudah yang berbasis pada minat,bakat dan keterampilan dengan memeperhatikan keterkaitanya dengan potensi ekonomi desa.
- 8) Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kelpok-kelompok prempuan usia sekolah,produktif dan deswasa.
- 9) Memastikan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman yang menjang terpenuhnya dan terlindungnya hak anak dan perempuan.
- 10) Penyediaan tanam baca/taman informasi bagi masyarakat desa sebagai sarana pengembangan diri dan ketersediaan informasi.

- 11) Melakukan pembinaan secara rutin/bertahap pada kegiatan keagamaan, olahraga, social budaya dan adat istiadat.
- 12) Memastikan terpenuhinya pendidikan dasar, pelayanan dasar, kesehatan dan terlindungnya hak-hak warga kurang mampu di Desa Matampapole.
- 13) Penyediaan dan pembinaan SDM Aparat pemerintahan Desa Matampapole yang berkualitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak masyarakat.

### **3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros**

Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dibentuk struktur organisasi yang sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa  
Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa tersebut [ UU RI No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1)  
1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Fungsinya BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah;
  - a) Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala desa.
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa

### 3) Sekertaris Desa

Bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 4) Pelaksanaan Teknis Desa

a) Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) untuk membantu kepala desa dalam mengelolah adminstrsi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b) Tugas Kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan) untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelolah administrasi pembangunan dan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembagunan, menyiapkan analisis dan kajian perkembangan ekonomi maysarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c) Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) untuk membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan tejnis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d) Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) untuk membantu sekretaris dalam mengelolah arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai peyedia, pemelihara dan

perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

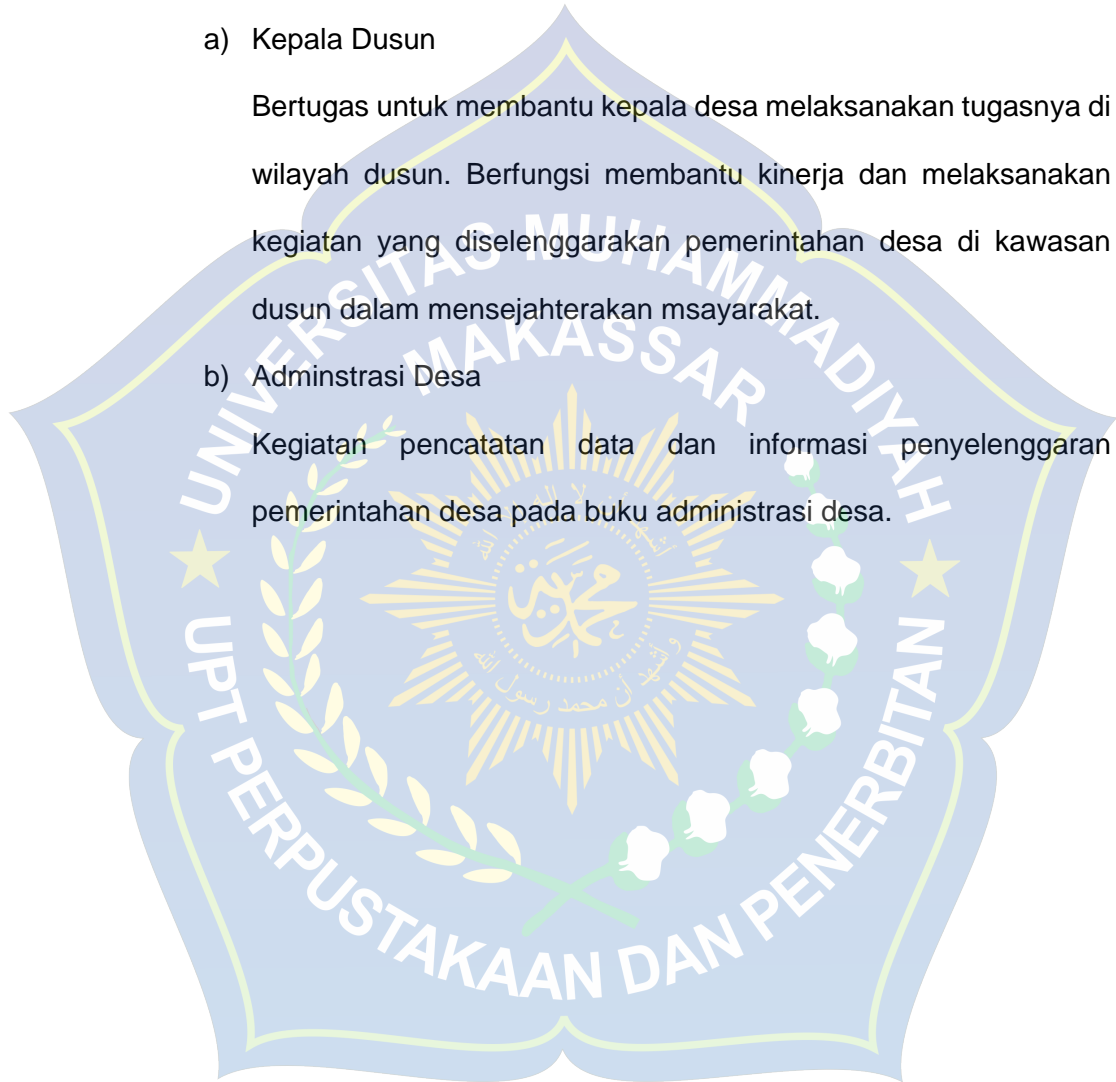
5) Pelaksanaan kewilayahan

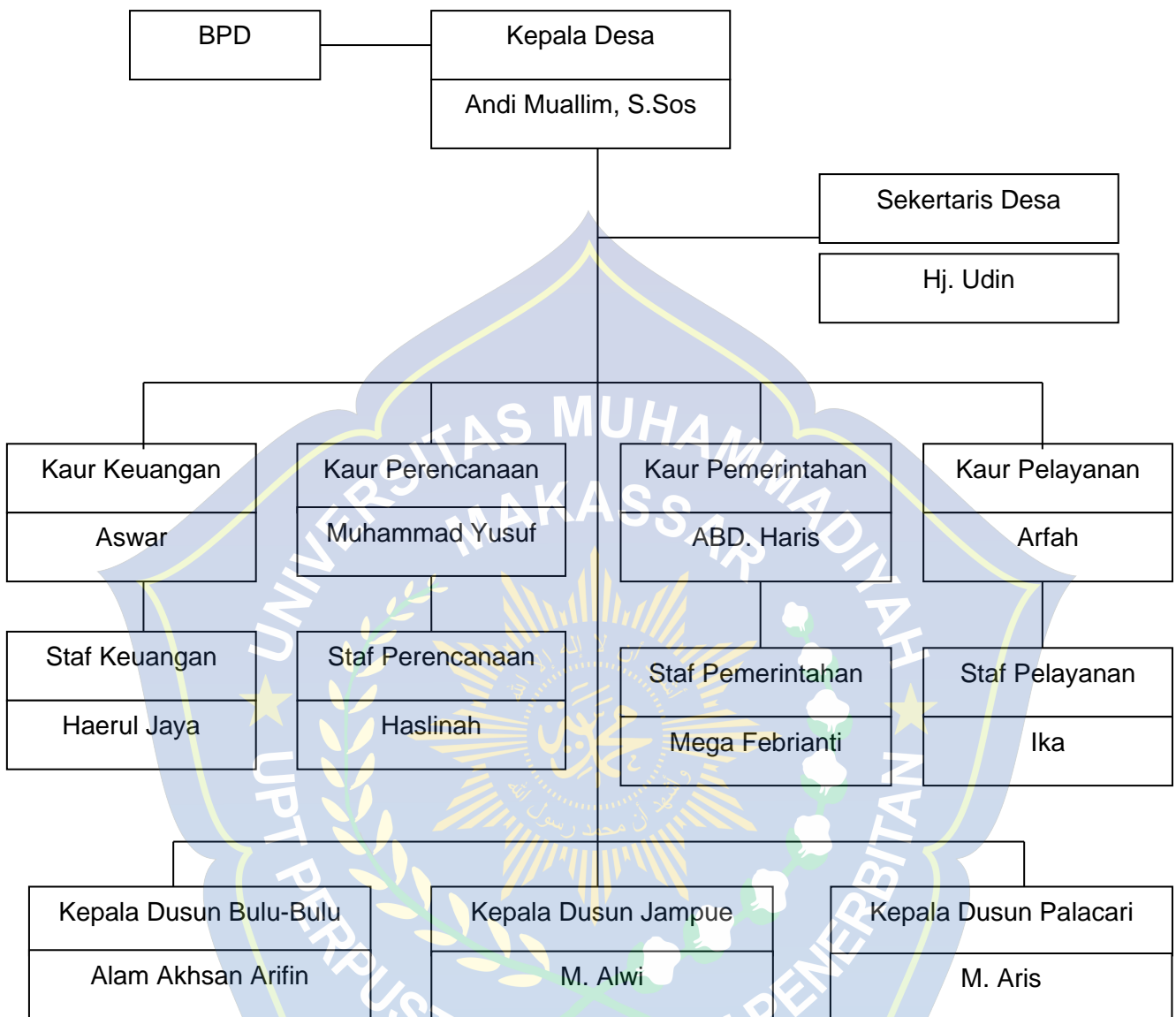
a) Kepala Dusun

Bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b) Administrasi Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.





**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mattampapole  
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2019-2025**



## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Data Responden

#### a. Jenis Kelamin

Jumlah responden dan besarnya presentase responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	51	57,0	57,0	57,0
	Perempuan	39	43,0	43,0	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa hasil berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki berjumlah 51 orang atau (57%) dan untuk jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 39 orang atau (43%). Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu lebih didominasi pada jenis kelamin perempuan.

#### b. Usia Responden.

Usia atau kisaran umur manusia yang terhitung sejak lahir hingga saat ini yang dapat diukur atau diketahui dengan satuan angka. Oleh karena itu usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 tahun	2	2,0	2,0	2,0
	20 tahun - 25 tahun	43	48,0	48,0	50,0
	26 tahun - 30 tahun	19	21,0	21,0	71,0
	31 tahun - 35 tahun	19	21,0	21,0	92,0
	> 40 tahun	7	8,0	8,0	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa hasil berdasarkan usia responden dalam penelitian ini yaitu kategori pada usia kurang dari 20 tahun berjumlah 2 orang atau (2%). Kemudian usia 20-25 tahun berjumlah 43 orang atau (48%), usia 26-30 tahun berjumlah 19 orang atau (21%), usia 31-35 tahun juga berjumlah 19 orang atau (21%), dan sisanya kategori pada usia di atas 40 tahun berjumlah 7 orang atau (8%). Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh responden dengan kategori usia 20-25 tahun.

### c. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir adalah perjalanan study yang dilakukan oleh responden ditingkat pendidikan dengan capaian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini dapat kita lihat rata-rata pendidikan terakhir dari para responden:

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

		Pendidikan Terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/MI	10	11,0	11,0	11,0
	SMP/MTS	25	28,0	28,0	39,0
	SMA/MAN/SMK	30	33,0	33,0	72,0
	S1	20	22,0	22,0	94,0
	S2	5	6,0	6,0	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa hasil berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian, dimana responden yang mengisi kusioner ini hanya terdiri dari 5 jenis pendidikan terakhir yakni SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN/SMK, S1, dan S2. Pada pendidikan terakhir SD/MI berjumlah 10 orang atau (11%), pendidikan terakhir SMP/MTS berjumlah 25 orang atau (28%), pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 30 orang atau (33%), pendidikan terakhir S1 berjumlah 20 orang atau (22%), dan pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 orang

atau (6%). Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi pada pendidikan terakhir SMA/MAN/SMK.

#### d. Jenis Pekerjaan

Jumlah responden dan besarnya presentase responden berdasarkan jenis pekerjaan disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

		Jenis Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	10	11,0	11,0	11,0
	Pedagang	15	17,0	17,0	28,0
	Swasta	10	11,0	11,0	39,0
	Wirausaha	15	17,0	17,0	56,0
	PNS	10	11,0	11,0	67,0
	TNI/Polri	5	6,0	6,0	73,0
	Lainnya (Serabutan)	25	27,0	27,0	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian, dimana responden yang mengisi kusioner ini hanya terdiri dari 7 jenis pekerjaan yakni petani, pedagang, swasta, wirausaha, PNS, TNI/Polri, dan lainnya (serabutan). Pada jenis pekerjaan petani berjumlah 10 orang atau (11%), jenis pekerjaan pedagang berjumlah 15 orang atau (17%), jenis pekerjaan swasta berjumlah 10 orang atau (11%), jenis pekerjaan wirausaha berjumlah 15 orang atau (17%), jenis pekerjaan PNS berjumlah 10 orang atau (11%), jenis pekerjaan TNI/Polri berjumlah 5 orang atau (6%), dan jenis pekerjaan lainnya (serabutan) berjumlah 25 orang atau (27%). Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi pada jenis pekerjaan lainnya (serabutan).

### e. Agama

Jumlah responden dan besarnya presentase responden berdasarkan agama yang dianut disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama**

		Agama			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	70	78,0	78,0	78,0
	Kristen/Nasrani	20	22,0	22,0	100,0
	Total	90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.5 telah menunjukkan bahwa hasil berdasarkan agama yang dianut dalam penelitian ini yaitu agama islam berjumlah 78 orang atau (78%) dan untuk agama kristen/nasrani yaitu berjumlah 22 orang atau (22%). Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu lebih didominasi pada agama islam.

### f. Jumlah Tanggungan

Jumlah responden dan besarnya presentase responden berdasarkan jumlah tanggungan yang dianut disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan**

		Jumlah Tanggungan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 3 orang	50	55,0	55,0	55,0
	3 – 6 orang	23	26,0	26,0	81,0
	> 6 orang	17	19,0	19,0	100,0
		90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.6 telah menunjukkan bahwa hasil berdasarkan jumlah tanggungan responden dalam penelitian ini yaitu jumlah tanggungan kurang dari 3 orang berjumlah 50 orang atau (55%). Kemudian jumlah tanggungan 3-6 orang berjumlah 23 orang atau (26%), dan jumlah tanggungan lebih dari 6 orang

berjumlah 17 orang atau (19%). Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh responden dengan jumlah tanggungan kurang dari 3 orang.

#### g. Status

Jumlah responden dan besarnya presentase responden berdasarkan status yang dianut disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Status**

		Status			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	30	33,0	33,0	33,0
	Menikah	45	50,0	50,0	83,0
	Duda/Janda	15	17,0	17,0	100,0
		90	100,0	100,0	

(Sumber: Data Penelitian, 2024).

Pada tabel 4.7 telah menunjukkan bahwa hasil berdasarkan status responden dalam penelitian ini yaitu status belum menikah berjumlah 30 orang atau (33%). Kemudian menikah berjumlah 45 orang atau (50%), dan status duda/janda berjumlah 15 orang atau (17%). Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh responden dengan status menikah.

## 2. Analisis Data Skripsi Deskriptif

### a. Deskripsi Alokasi Dana Desa

Data alokasi dana desa diambil dengan menggunakan kuesioner/angket tertutup dengan alternatif jawaban "Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju". Pernyataan yang digunakan dalam angket ini adalah sebanyak 10 butir pernyataan dengan 90 responden. Berdasarkan tabel pengolahan data dengan menggunakan bantuan komputer program statistik SPSS

versi 25 for Windows tentang alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel frequency berikut:

**Tabel 4.8 Frequency Data Alokasi Dana Desa**

Total X1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	68	2	2.2	2.2	2.2
	67	1	1.1	1.1	3.3
	66	1	1.1	1.1	4.4
	64	1	1.1	1.1	5.5
	63	2	2.2	2.2	7.7
	62	3	3.3	3.3	11.0
	61	1	1.1	1.1	12.1
	60	2	2.2	2.2	14.3
	59	4	4.4	4.4	18.7
	58	6	6.7	6.7	25.4
	57	3	3.3	3.3	28.7
	56	6	6.7	6.7	35.4
	55	5	5.6	5.6	41.0
	54	3	3.3	3.3	44.3
	53	3	3.3	3.3	47.6
	52	10	11.1	11.1	58.7
	51	6	6.7	6.7	65.4
	50	7	7.8	7.8	73.2
	49	3	3.3	3.3	76.5
	48	6	6.7	6.7	83.2
47	2	2.2	2.2	85.4	
46	3	3.3	3.3	88.7	
45	2	2.2	2.2	90.9	
44	2	2.2	2.2	93.1	
43	1	1.1	1.1	94.2	
41	2	2.2	2.2	96.4	
36	2	2.2	2.2	98.6	
34	1	1.1	1.1	100.0	
Total		90	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 90 responden masyarakat Desa Mattampapole yakni persentase tertinggi 11% dengan jumlah responden 10 orang yang memperoleh skor 52.

**Tabel 4.9 Deskriptive Statistic Alokasi Dana Desa**

	Statistic	
	Valid	Missing
N	90	0
Mean	52.30	
Std. Error of Mean	1.010	
Median	54.00	
Mode	54	
Std. Deviation	8.345	
Variance	53.871	
Range	34	
Minimum	34	
Maximum	68	
Sum	4707	

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terhitung 90 responden masyarakat Desa Mattampapole terhitung valid dengan 0 missing. Mean (rata-rata) jawaban responden 52,30 dengan median sebanyak 54.00. Mode sebesar 54 dengan standar deviation 8,345 dan nilai variance sebesar 53,871. Range yang didapatkan sebesar 34 dengan skor minimum 34 dan maximum 68 dengan jumlah keseluruhan respon yakni 4707.

**Tabel 4.10 Frequency Data Pemberdayaan Masyarakat**

Total X2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	68	3	3.3	3.3	3.3
	65	1	1.1	1.1	4.4
	64	1	1.1	1.1	5.5
	63	4	4.4	4.4	9.9
	62	2	2.2	2.2	12.1
	61	3	3.3	3.3	15.4
	60	1	1.1	1.1	16.5
	59	1	1.1	1.1	17.6
	58	6	6.7	6.7	24.3
	57	10	11.1	11.1	35.4
	56	1	1.1	1.1	36.5
	55	5	5.6	5.6	42.1
	54	6	6.7	6.7	48.8
	53	7	7.8	7.8	56.6
	52	4	4.4	4.4	61.0

	51	8	8.9	8.9	69.9
	50	5	5.6	5.6	75.5
	49	4	4.4	4.4	79.9
	48	6	6.7	6.7	86.6
	47	3	3.3	3.3	89.9
	46	3	3.3	3.3	93.2
	45	3	3.3	3.3	96.5
	44	1	1.1	1.1	97.6
	42	2	2.2	2.2	100.0
Total		90	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 90 responden masyarakat Desa Mattampapole yakni persentase tertinggi 11% dengan jumlah responden 10 orang yang memperoleh skor 57.

**Tabel 4.11 Deskriptive Statistic Pemberdayaan Masyarakat**

Statistic		
N	<b>Valid</b>	<b>90</b>
	<b>Missing</b>	<b>0</b>
Mean		53.85
Std. Error of Mean		1.456
Median		55.00
Mode		55
Std. Deviation		9.813
Variance		82.431
Range		26
Minimum		42
Maximum		68
Sum		4847

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terhitung 90 reponden masyarakat Desa Mattampapole terhitung valid dengan 0 missing. Mean (rata-rata) jawaban responden 53,85 dengan median sebanyak 54,00. Mode sebesar 54 dengan standar deviation 9,813 dan nilai variance sebesar 82,431. Range yang didapatkan sebesar 26 dengan skor minimum 42 dan maximum 68 dengan jumlah keseluruhan respon yakni 4847.



**Tabel 4.12 Frequency Data Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

		Total Y			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40	8	8.9	8.9	8.9
	39	1	1.1	1.1	10.0
	38	4	4.4	4.4	14.4
	37	5	5.6	5.6	20.0
	36	8	8.9	8.9	28.9
	35	6	6.7	6.7	35.6
	34	19	21.1	21.1	56.7
	33	1	1.1	1.1	57.8
	32	8	8.9	8.9	66.7
	31	8	8.9	8.9	75.6
	30	9	10.0	10.0	85.6
	29	5	5.6	5.6	91.2
	28	5	5.6	5.6	96.8
	27	2	2.2	2.2	99.0
23	1	1.1	1.1	100.0	
Total		90	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dari 90 responden masyarakat Desa Mattappapole yakni persentase tertinggi 21% dengan jumlah responden 19 orang yang memperoleh skor 34.

**Tabel 4.13 Deskriptive Statistic Pemberdayaan masyarakat**

Statistic		
N	Valid	90
	Missing	0
Mean		33.43
Std. Error of Mean		1.098
Median		33.00
Mode		33
Std. Deviation		7.935
Variance		62.723
Range		17
Minimum		23
Maximum		40
Sum		3009

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terhitung 90 reponden masyarakat Desa Mattappapole terhitung valid dengan 0 missing. Mean (rata-rata) jawaban

responden 33,43 dengan median sebanyak 33,0. Mode sebesar 33 dengan standar deviation 7,935 dan nilai variance sebesar 62,723. Range yang didapatkan sebesar 17 dengan skor minimum 23 dan maximum 40 dengan jumlah keseluruhan respon yakni 3009.

## 6) Teknik Analisis Data Inferensial

Pada analisis statistik inferensial dapat dilakukan beberapa pengujian untuk pengujian hipotesis. Adapun pengujian dasar yang harus dilakukan yaitu:

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel benar-benar berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan dalam penelitian ini dengan statistik uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov SPSS for Windows*. Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikan  $< 0,05$  berarti sampel berdistribusi tidak normal, sedangkan apabila nilai signifikan  $> 0,05$  berarti sampel berdistribusi normal. Adapun hasil dari uji normalitas yang telah didapatkan sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,33103072
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,078
Test Statistic		,105
Asymp. Sig. (2-tailed)		,702 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji dengan mengetahui nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,702 dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Adapun nilai yang diperoleh lebih besar dari ( $0,702 > 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor berdistribusi normal.

## b. Uji Hipotesis

### a. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole.

#### 1) Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu alokasi dana desa terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $t_{tabel} = (t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025 : 97) = 1.987$ . Hasil uji t melalui bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15 Hasil Uji T Alokasi Dana Desa**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model			Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	105.923	20.245		5.075	.000
	Alokasi dana desa	.261	.149	.225	2.656	.001

**a.** Dependent Variabel: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh alokasi dana desa ( $X_1$ ) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) adalah  $0,001 < 0,05$  dan nilai thitung  $2,656 >$  nilai ttabel  $1,987$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

#### 2) Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu alokasi dana desa (simultan) terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $F_{tabel} = F(k:n-k) = F(2 : 88) = 3,100$ . Hasil uji f melalui bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.16 Hasil Uji F Alokasi Dana Desa**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	572.653	1	572.653	5.780	0,002 <sup>b</sup>
	Residual	3233.611	88	6.748		
	Total	3636.012	89			
a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa						

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh alokasi dana desa (X1) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar  $0,002 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 5,780 > F_{tabel} 3,100$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi (R) dari hasil regresi linier sederhana menunjukkan seberapa besar variabel dependen yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen alokasi dana desa. Hasil uji koefisien determinasi (R) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi (R) Alokasi Dana Desa**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 <sup>a</sup>	.495	.335	9.667

**a.** Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square sebesar 0,495 artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 49,5% sisanya 50,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

**b. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole.**

1) Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pemberdayaan masyarakat terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $t_{tabel} = (t_{(\alpha/2; n-k-1)}) = t_{(0,025 : 87)} = 1.987$ . Hasil uji t melalui bantuan komputer program statistik SPSS versi 25 for Windows dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.18 Hasil Uji T Pemberdayaan Masyarakat**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	146.889	16.187		7.7850
	Pemberdayaan masyarakat	.362	.122	.312	2.6563

**a.** Dependent Variabel: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemberdayaan masyarakat alokasi dana desa (X<sub>2</sub>) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) adalah  $0,003 < 0,05$  dan nilai thitung

2,656 > nilai ttabel 1,987. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

## 2) Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pemberdayaan masyarakat (simultan) terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $F_{tabel} = F_{(k:n-k)} = F_{(2 : 88)} = 3,100$ . Hasil uji f melalui bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19 Hasil Uji F Pemberdayaan Masyarakat**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.589	1	14.589	4.889	0,003 <sup>b</sup>
	Residual	3834.851	88	64.812		
	Total	3298.182	89			
a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat						

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ ) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,003 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 4,889 > F_{tabel} 3,100$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 3) Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi (R) dari hasil regresi linier sederhana menunjukkan seberapa besar variabel dependen yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen pemberdayaan masyarakat. Hasil uji koefisien determinasi (R) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.20 Hasil Koefisien Determinasi (R) Pemberdayaan masyarakat**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 <sup>a</sup>	.503	.362	9.852

b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square sebesar 0,503 artinya terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 50,3% sisanya 49,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

### c. Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole.

#### 1) Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan uji prasyarat pada analisis statistik, diperoleh bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole. Berikut ini adalah tabel hasil uji regresi linier berganda:

**Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	108.892	24.1392		4.365	.000
	Alokasi dana desa	.261	.149	.225	2.656	.001
	Pemberdayaan masyarakat	.362	.122	.312	2.656	.003

a. Dependent Variabel: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 108,892 + 0,261 (X1) + 0,362 (X2)$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nilai konstanta  $a$  adalah 108,892 menunjukkan bahwa jika variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat adalah nol maka peningkatan kesejahteraan masyarakat nilainya adalah 108,892.
- (2) Nilai koefisien regresi variabel alokasi dana desa adalah 0,261 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% alokasi dana desa, akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,261.
- (3) Nilai koefisien regresi variabel pemberdayaan masyarakat adalah 0,362 hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% alokasi dana desa, akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,362.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

## 2) Uji Parsial (Uji T)

Uji  $t$  dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $t_{tabel} = (t$



$(a/2;n-k-1) = t (0,025 : 87) = 1.987$ . Hasil uji t melalui bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22 Hasil Uji T Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model			Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108.892	24.1392		4.365	.000
	Alokasi dana desa	.261	.149	.225	2.656	.001
	Pemberdayaan masyarakat	.362	.122	.312	2.656	.003

**a.** Dependent Variabel: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Pengujian masing-masing variabel secara parsial di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengaruh alokasi dana desa (X1) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil pengujian SPSS untuk variabel alokasi dana desa (X1) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) diperoleh nilai thitung 2,656 > nilai ttabel 1,987. Selain itu, nilai signifikannya adalah sebesar 0,001 < 0,05. Karena nilai thitung > ttabel (2,656 > 1,987) dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

(2) Pengaruh pemberdayaan masyarakat (X2) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil pengujian SPSS untuk variabel pemberdayaan masyarakat (X2) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) diperoleh nilai thitung 2,656 > nilai ttabel 1,987. Selain itu, nilai signifikannya adalah sebesar 0,003 < 0,05. Karena nilai thitung > ttabel (2,656 > 1,987) dan nilai signifikansi sebesar 0,003 <

0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

### 3) Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan  $F_{tabel} = F_{(k:n-k)} = F_{(2 : 88)} = 3,100$ . Hasil uji f melalui bantuan komputer program statistik *SPSS versi 25 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23 Hasil Uji F Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	172.921	1	91.120	5.342	0,002 <sup>b</sup>
	Residual	3834.851	88	69.182		
	Total	3590.172	89			
a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat						

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) dari tabel di atas diketahui Fhitung sebesar 5,342 dengan nilai signifikansi 0,002 sedangkan Ftabel pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,100. Hal ini berarti bahwa Fhitung  $5,342 > Ftabel$  3,100 dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh secara (simultan) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4) Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi (R) dari hasil regresi linier sederhana menunjukkan seberapa besar variabel dependen yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil uji koefisien determinasi (R) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinasi (R) Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan masyarakat**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.580 <sup>a</sup>	.519	.542	8.19872

**c.** Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

(Sumber: Hasil Olahan Data 2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square sebesar 0,519 artinya terdapat pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 51,9% sisanya 48,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### C. Pembahasan

Dana Desa diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat desa, mulai dari tahapan kesejahteraan. Untuk dapat memperoleh hal tersebut masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan program-program yang akan didanai dari alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa (Ramli et al., 2018:49). Menurut Rahayu (2017:09) pengalokasian dana terhadap desa dari Kabupaten/Kota dengan berdasarkan jumlah tiap desa, serta memperhatikan jumlah penduduk, luas

wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis. ADD digunakan dalam pembiayaan keseluruhan bentuk kewenangan dalam mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4.25 Analisis Trend Realisasi Anggaran Desa Matampapole Kabupaten Maros 2023-2024**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
		Semester lalu	Semester ini	SD.Semester ini	
Pendapatan Asli Desa	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00
Hasil Usaha Desa	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00
Bagi Hasil BUMDes	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.648.535.000,00	0,00	708.187.972,00	708.187.972,00	430.744.800,00
Dana Desa	769.508.000,00	0,00	338.763.200,00	338.763.200,00	430.744.800,00
Alokasi Dana Desa	879.027.000,00	0,00	369.434.772,00	369.434.772,00	509.592.228,00
Pendapatan Desa Yang Sah	722.332,00	722.332,00	722.332,00	1.444.654,00	722.332,00
Jumlah pendapatan	1.653.137.332,00	722.332,00	712.500.304,00	713.522.636,00	939.614.695,00

Sumber: Kantor Desa Matampapole Kabupaten Maros 2023

Hasil pengujian hipotesis ditemukan terdapat pengaruh yang signifikan antara alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif yang menunjukkan alokasi dana desa memberikan pengaruh

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, didukung dengan hasil analisis inferensial, dimana hasil analisis hipotesis yang telah dilakukan, yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh alokasi dana desa (X1) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) adalah  $0,001 < 0,05$  dan nilai thitung  $2,656 > \text{nilai ttabel } 1,987$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari R square sebesar 0,495 yang berarti besarnya pengaruh yang diberikan oleh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 49,5% dan 50,5% dari faktor lain. Dari hasil nilai r square antara alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai r square sebesar 0,495 berada pada interval 0,40 – 0,599 yang berarti bahwa alokasi dana desa mempunyai tingkat pengaruh yang sedang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai upaya bentuk pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, perilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat dalam desa (Soimin, 2019:31). Dalam UU Desa dijelaskan bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa (masyarakat) agar menjadi kuat, maju dan mandiri serta demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat atau meningkatnya kesejahteraan masyarakat, didukung dengan hasil analisis inferensial, dimana hasil analisis hipotesis yang telah dilakukan, yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pemberdayaan masyarakat alokasi dana desa (X2) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) adalah  $0,003 < 0,05$  dan nilai thitung  $2,656 >$  nilai ttabel  $1,987$ . Maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari R square sebesar 0,503 yang berarti besarnya pengaruh yang diberikan oleh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 50,3% dan 49,7% dari faktor lain. Dari hasil nilai r square antara pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai r square sebesar 0,503 berada pada interval 0,40 – 0,599 yang berarti bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai tingkat pengaruh yang sedang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi linier berganda alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole. Diperoleh hasil variabel alokasi dana desa (X1) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) diperoleh nilai thitung  $2,656 >$  nilai ttabel  $1,987$ . Selain itu, nilai signifikannya adalah sebesar  $0,001 < 0,05$ . Karena nilai thitung  $>$  ttabel ( $2,656 > 1,987$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Pada variabel pemberdayaan masyarakat (X2) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) diperoleh nilai thitung  $2,656 >$  nilai ttabel  $1,987$ . Selain itu, nilai

signifikannya adalah sebesar  $0,003 < 0,05$ . Karena nilai thitung  $> t_{tabel}$  ( $2,656 > 1,987$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari R square sebesar 0,519 yang berarti besarnya pengaruh yang diberikan oleh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 51,9% dan 48,1% dari faktor lain. Dari hasil nilai r square antara alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai r square sebesar 0,519 berada pada interval 0,40 – 0,599 yang berarti bahwa alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tingkat pengaruh yang sedang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Kusumawardani & Alfiah, 2022) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan itu penelitian (Fathony et al., 2019) dengan hasil penelitian bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung dan alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole didapatkan thitung sebesar 2,656 dan ttabel 1,987 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya thitung  $2,656 > ttabel 1,987$  dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , dengan kategori sedang dengan persentase 49,5%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole.
2. Pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole didapatkan thitung sebesar 2,656 dan ttabel 1,987 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Artinya thitung  $2,656 > ttabel 1,987$  dengan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ , dengan kategori sedang dengan persentase 50,3%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole.
3. Pengaruh alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole adalah 51,9%, sisanya 48,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Artinya alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh



terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 51,9% dengan kategori sedang. Adapun alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapole dengan kategori sedang dengan persentase 51,9%.

## **B. Saran**

Berikut adalah uraian beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dalam melakukan penelitian ini hingga memperoleh hasil yang sangat baik, diantaranya:

### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros agar lebih transparansi dan terbuka mengenai informasi alokasi dana desa kepada masyarakat serta menyediakan pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dana serta proyek pengembangan yang berkelanjutan demi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Mattampapole.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Kepada peneliti selanjutnya dapat diarahkan agar dapat melakukan perluasan variabel-variabel lain karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mattampapol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Syukri, M., & Sari, I. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*. 7(2), 85–103.
- Elvina, Dan Musdhalifah. (2018). *Peningkatang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening* 3(1), 1- 9.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., Sopian, A., Ekonomi, F., Studi, P., Universitas, A., Bandung, B., Desa, P., Dusun, K., & Masyarakat, P. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. 10, 41–57.
- Firdaus, M. (2011). *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Progam IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbis Universitas Diponegoro.
- Gischa, Serafica. (2021). *Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Harahap, A. Y. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi : Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu , Kabupaten Aceh Tamiang )*. 1(3), 151–157.
- <https://vectormine.com/item/random-sampling-analysis-method-vector-illustration-example-diagram/> di akses pada tanggal 18 Mei 2024
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan )*. 2(4), 597–602.
- Kusumawardani, V. P., & Alfiyah, T. D. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan)*. 7, 92–104.
- Lalira, L., & Dkk. (2018). *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinandi Kecamatan Gemeh kabupaten Kepulauan Talaud*. 8(4), 62-72
- Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa ( Add ) Terhadap Organisasi Dan Manajemen, 5, 10–12.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfirah, Hadyratul. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Ekonomi Syariah*

- Muslihah, Siti., Hilda, O.S. Dan Sriniyati. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. 7(1), 85-93.
- Nasikun. (1993). *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:PT. Tiara Wacana.
- Noor, J. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 5 Tahun 2005 Dan No 21 Tahun 2015 Tentang *Pengalokasian Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.
- Permendagri No. 113/2014 Pasal 1 Ayat (10) Tentang *Alokasi Dana Desa*.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Permendagri No. 21/2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang *Tujuan Alokasi Dana Desa*.
- Permendagri RI No. 7 Tahun 2007 Dalam Pasal 1 Ayat (8) Tentang *Kader Pemberdayaan Masyarakat*.
- Permendes No. 5 Tahun 2014 Tentang *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Prayitno, Ujianto Singgih. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Graha Azza Grafika.
- Rahayu, Depi. (2017). *Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang* 6 (2), 107-116.
- Ramaza, Desi Riska (2022) *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Selatan* Ilmu Ekonomi.
- Ramli, Ar Royyan., Wahyuddin., Julli Murshida Dan Mawardati. (2018). *Ekonomi Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Rosidin, Utang. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M. (2020). *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *J-Ebis*, 5, 77–90.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Citra Utama.
- Sunu, Kalpika Krisna, Dan Suyana Utama. (2019). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali* 8(8), 843-872.

- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Soimin. (2019). *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Dalam Pasal 72 Ayat (1) Tentang *Perhitungan ADD*.
- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang *Pertanggungjawaban Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 Tentang *Pembangunan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Undang-Undang Desa No. 6/2014 Tentang *Siklus Pengelolaan Dana Desa*.
- Undang-Undang No. 11/2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang *Sumber Pendapatan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Vicky, F. V. T., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. 13, 335–342.



# LAMPIRAN

## KUESIONER PENELITIAN

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Pendidikan terakhir :  
 Pekerjaan :  
 Agama :  
 Alamat/Desa :  
 Jumlah Tanggungan :  
 Status :

### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- a) Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan.
- b) Berilah tanda (√) pada pada kolom yang anda anggap paling tepat mewakili pilihan anda.
- c) Ada lima alternatif jawaban, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu :
  - 1) SS = Sangat Setuju
  - 2) S = Setuju
  - 3) RR = Ragu-Ragu
  - 4) TS = Tidak Setuju
  - 5) STS = Sangat Tidak Setuju

### C. Daftar Pernyataan

#### 1. Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
<b>Indikator : Transparan</b>						
1	Aparat desa menginformasikan latar belakang pemberian alokasi dana desa					
2	Aparat desa memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa					
3	Aparat desa menyampaikan sasaran pemberian alokasi dana desa					
4	Aparat desa memberitahukan jumlah alokasi dana desa yang diperoleh desa					
5	Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah					
<b>Indikator : Akuntabel</b>						

6	Aparat desa melaporkan pencapaian indikator pemberian alokasi dana desa					
7	Aparat desa melaporkan dengan rinci mengenai penggunaan dana desa					
8	Aparat desa melaporkan pemanfaatan alokasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat					
9	Aparat desa memberikan informasi secara berkala mengenai penggunaan dana desa					
10	Laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa disusun secara jujur berdasarkan perhitungan yang telah direncanakan					
<b>Indikator : Partisipatif</b>						
11	Masyarakat desa dipanggil untuk melakukan musyawarah rencana penggunaan dana desa					
12	Masyarakat desa dapat mengusulkan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa					
13	Masyarakat desa dapat memberi masukan untuk perbaikan atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang lampau					
14	Masyarakat desa bersedia menerima dan menjaga hasil dari program alokasi dana desa					
15	Masyarakat diperbolehkan untuk mengawasi proyek pembangunan desa					

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
<b>Indikator : Kemampuan</b>						
1	Penggunaan dana desa untuk pelatihan kepada masyarakat telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya					
2	Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendukung aktivitas kerja					
3	Pelatihan dapat meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat					

4	Pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan mampu memperoleh pendidikan dan meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat					
5	Tersedianya saluran air minum yang bersih mampu menjaga kesehatan masyarakat					
<b>Indikator : Kepercayaan</b>						
6	Saya percaya aparat desa telah mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku					
7	Informasi mengenai pengelolaan dana desa diterima dengan baik oleh masyarakat					
8	Masyarakat diberi kepercayaan untuk mengawasi proyek bangunan desa					
<b>Indikator : Wewenang</b>						
9	Saya diberikan wewenang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dana desa					
10	Saya diberikan wewenang dalam membantu menyukseskan program desa yang didanai dari alokasi dana desa					
11	Masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritikan kepada program desa yang didanai dari alokasi dana desa					
12	Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa					
13	Masyarakat bersedia menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa					
<b>Indikator: Tanggung Jawab</b>						
14	Setiap masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa					
15	Setiap masyarakat diberikan tanggung jawab untuk ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat yang disepakati					



### 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
<b>Indikator : Keadilan Sosial</b>						
1	Dengan adanya alokasi dana desa, fasilitas Alokasi dana desa di desa menjadi semakin baik					
2	Dengan adanya alokasi dana desa, fasilitas Kesehatan di desa menjadi semakin baik.					
3	Dengan adanya alokasi dana desa, semakin banyak masyarakat desa yang dapat menempuh Alokasi dana desa dasar dan menengah					
4	Dengan adanya alokasi dana desa, masyarakat desa mendapatkan pelayananan Kesehatan yang lebih baik					
<b>Indikator : Keadilan Ekonomi</b>						
5	Dengan adanya alokasi dana desa, masyarakat desa memiliki keahlian kerja yang semakin baik					
6	Dengan keahlian yang didapat dari program pemberdayaan masyarakat desa, pendapatan masyarakat desa semakin meningkat .					
7	Program pemberdayaan masyarakat desa telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa					
<b>Indikator : Keadilan Demokrasi</b>						
8	Program Alokasi Dana Desa telah menghidupkan musyawarah untuk mufakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.					
9	Program Alokasi Dana Desa telah menghidupkan musyawarah untuk mufakat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.					
10	Masyarakat desa terdorong untuk memberikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain dalam merencanakan Alokasi Dana Desa.					

## Lampiran 2

## DATA RESPONDEN

No	Kode Jenis Kelamin:	Kode Usia:	Kode Pendidikan:	Kode Jenis Pekerjaan:	Kode Agama:	Kode Jumlah Tanggungan:	Kode Status:
1	2	2	2	1	1	1	1
2	1	2	2	3	1	1	1
3	1	2	3	7	1	1	1
4	2	1	4	5	1	2	1
5	1	2	2	1	1	1	1
6	1	2	3	1	1	1	1
7	1	2	4	7	1	2	1
8	2	1	4	5	1	1	1
9	1	2	3	7	1	1	1
10	1	2	4	5	1	2	1
11	1	2	2	3	2	3	1
12	2	2	3	7	2	1	1
13	1	2	4	5	1	2	1
14	2	2	3	3	1	1	1
15	1	4	1	3	2	3	2
16	2	2	2	7	2	1	1
17	1	2	4	7	1	2	1
18	1	2	3	3	2	3	1
19	1	3	2	7	1	1	2
20	2	4	1	2	2	1	3
21	1	3	2	7	1	3	2
22	2	2	4	3	1	2	1
23	2	2	4	3	2	1	1
24	2	5	2	7	1	3	3
25	1	2	3	2	1	1	2
26	2	5	4	7	1	2	1
27	2	3	4	3	2	1	1
28	1	3	3	7	1	1	2
29	2	4	2	2	1	3	3
30	1	4	4	7	1	2	3
31	2	3	3	3	1	1	2
32	2	3	4	5	1	1	3
33	1	4	3	7	1	2	2
34	1	5	1	7	1	3	3
35	2	4	3	7	1	1	2
36	2	2	2	2	2	2	3
37	1	4	4	4	1	1	2

38	1	2	4	3	1	1	1
39	2	5	3	7	1	2	1
40	1	2	4	3	1	1	1
41	1	5	3	7	1	1	3
42	2	5	3	2	1	2	1
43	1	3	3	2	2	1	1
44	1	3	2	7	2	1	3
45	2	3	1	7	1	2	2
46	1	2	2	7	1	1	1
47	1	4	5	5	1	3	3
48	2	2	2	7	1	1	3
49	1	2	3	7	1	2	1
50	1	4	1	2	2	3	1
51	1	2	3	7	1	1	1
52	2	3	2	7	2	1	2
53	1	2	3	7	1	2	2
54	1	2	2	1	2	3	2
55	1	4	2	4	1	1	2
56	2	2	3	2	1	2	2
57	1	4	2	4	1	1	2
58	1	2	3	4	1	3	2
59	1	2	1	1	1	1	2
60	1	2	2	6	2	1	2
61	2	2	3	2	2	1	2
62	1	2	2	4	1	2	3
63	1	3	3	4	1	3	2
64	2	2	1	2	1	1	2
65	2	2	3	4	1	1	2
66	1	2	3	1	2	1	2
67	1	2	2	4	1	1	2
68	2	3	5	1	1	2	2
69	2	4	5	6	1	3	2
70	2	2	4	6	1	2	2
71	2	4	2	4	1	1	2
72	1	2	3	2	1	1	2
73	2	2	4	5	1	1	2
74	1	2	3	4	1	3	2
75	1	3	3	1	1	1	2
76	1	4	2	4	1	2	2
77	1	3	4	5	1	1	3
78	2	4	3	4	1	1	2
79	1	4	2	2	1	3	2

80	2	3	1	1	1	3	3
81	2	3	3	4	1	1	2
82	1	4	4	5	1	2	2
83	2	2	3	2	2	1	2
84	1	4	4	6	1	1	2
85	2	2	2	4	1	1	2
86	2	3	5	1	1	1	2
87	2	4	1	2	2	2	2
88	1	3	2	5	1	3	2
89	1	3	5	6	1	1	2
90	2	5	1	2	2	2	3

**Keterangan****Kode Jenis Kelamin:**

- 1 = Laki-Laki  
2 = Perempuan

**Kode Usia:**

- 1 = 0 - 20 tahun  
2 = 20 tahun - 25 tahun  
3 = 26 tahun - 30 tahun  
4 = 31 tahun - 35 tahun  
5 = > 36 tahun

**Kode Pendidikan:**

- 1 = SD/MI  
2 = SMP/MTS  
3 = SMA/MAN/SMK  
4 = S1  
5 = S2

**Kode Jenis Pekerjaan:**

- 1 = Petani  
2 = Pedagang  
3 = Swasta  
4 = Wirausaha  
5 = PNS  
6 = TNI/Polri  
7 = Lainnya (Serabutan)

**Kode Agama:**

- 1 = Islam  
2 = Kristen/Nasrani

**Kode Jumlah Tanggungan:**

- 1 = 1 - 3 orang  
2 = 3 - 6 orang  
3 = > 7 orang

**Kode Status:**

- 1 = Belum Menikah  
2 = Menikah  
3 = Duda/Janda

## Lampiran 3

Tabulasi Data

No Responden	Alokasi dana desa (X1)															
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	Total
1	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	2	2	3	1	2	54
2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	2	2	1	2	51
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	2	2	1	48
4	5	5	4	3	5	4	5	4	5	4	1	3	2	2	2	54
5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	1	2	2	2	3	54
6	4	5	4	4	5	4	5	4	3	4	2	2	3	1	2	52
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	3	50
8	4	4	4	4	2	2	4	4	4	5	2	2	3	1	2	47
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	1	2	50
10	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	3	2	2	1	59
11	4	3	2	5	4	2	4	4	2	4	1	3	2	2	2	44
12	4	2	4	4	4	2	2	4	2	3	1	2	2	2	3	41
13	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	3	1	2	55
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	2	2	3	1	2	50
15	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	1	2	49
16	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	2	2	1	46
17	4	2	4	4	4	3	2	5	4	3	1	2	2	2	3	45
18	4	3	2	4	3	3	4	3	2	3	2	2	3	1	2	41
19	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	1	2	2	2	3	45
20	3	3	3	5	4	4	4	4	3	4	2	2	3	1	2	47
21	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	5	46
22	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	3	4	4	5	46
23	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	3	4	2	44
24	5	3	3	4	4	3	5	4	3	5	3	4	5	4	2	49
25	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	5	3	4	4	36
26	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	2	4	5	3	4	59
27	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	5	4	4	48

28	3	4	3	5	4	3	3	3	2	3	5	4	4	2	3	51
29	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	5	2	55
30	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	4	4	5	58
31	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	3	4	2	55
32	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	3	4	5	4	2	60
33	4	3	3	4	4	4	4	2	5	2	2	5	3	4	4	53
34	5	4	4	5	5	4	3	4	3	3	5	3	2	4	4	58
35	2	2	3	3	1	1	1	1	1	3	5	4	4	2	3	36
36	3	3	3	4	3	4	5	4	2	3	4	3	4	2	5	52
37	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	2	4	4	5	66
38	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	2	67
39	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	4	5	4	2	64
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	4	68
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	5	3	2	48
42	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	2	3	5	4	4	62
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	2	59
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	5	68
45	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	5	4	3	4	2	50
46	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	56
47	4	2	2	3	3	2	3	3	2	3	4	3	4	3	2	45
48	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	2	3	55
49	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	4	48
50	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	2	51
51	3	4	4	4	4	3	5	4	4	3	2	3	3	4	4	56
52	4	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4	3	4	3	2	52
53	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	58
54	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	2	3	3	4	62
55	5	5	2	4	4	4	5	2	4	5	4	3	3	4	2	58
56	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	3	3	4	4	59
57	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	57
58	5	5	4	2	3	2	4	4	4	4	4	2	3	3	4	53
59	2	3	3	3	3	3	4	3	4	5	4	3	3	4	2	49
60	3	3	4	3	4	3	5	3	3	4	4	3	4	3	2	51

61	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	3	55
62	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	2	3	3	4	58
63	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	4	3	3	4	2	50
64	4	4	3	4	4	4	5	3	4	5	2	3	3	4	4	56
65	3	3	2	2	3	4	3	2	2	3	4	3	4	3	2	43
66	4	4	5	5	3	4	5	3	4	5	3	4	4	2	3	58
67	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	50
68	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	51
69	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	2	3	3	4	4	52
70	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	2	56
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	2	34
72	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	2	2	4	50
73	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	2	2	2	60
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	52
75	4	5	5	3	3	4	5	3	4	5	2	3	2	2	4	56
76	5	4	3	4	3	2	4	4	5	4	3	2	2	4	2	51
77	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	2	2	4	48
78	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	2	2	57
79	3	4	4	3	3	4	5	3	3	4	3	4	2	2	2	56
80	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	2	3	2	2	57
81	4	4	4	4	3	4	5	3	3	5	3	2	2	4	2	53
82	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	2	3	2	2	52
83	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	2	61
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	3	2	2	52
85	4	4	4	3	3	5	3	4	4	4	2	3	2	2	4	52
86	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	3	2	2	4	2	48
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2	2	4	52
88	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	2	3	2	2	63
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	2	2	52
90	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	2	3	2	2	63

No Responden	Pemberdayaan masyarakat (X2)															
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	Total
1	3	5	5	4	5	4	4	4	5	4	2	2	3	1	2	53
2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	2	2	1	2	55
3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	1	52
4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	4	1	3	2	2	2	48
5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	1	2	2	2	3	55
6	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	2	2	3	1	2	54
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	2	2	2	3	49
8	5	5	4	5	5	4	4	4	2	2	2	2	3	1	2	50
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	1	2	50
10	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	2	3	2	2	1	58
11	5	5	5	5	5	4	2	5	4	2	1	3	2	2	2	52
12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2	3	46
13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	2	2	2	3	53
14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	1	2	50
15	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	1	2	49
16	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	2	3	2	2	1	45
17	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	1	2	2	2	3	47
18	4	4	3	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	1	2	44
19	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	1	2	2	2	3	46
20	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	2	2	3	1	2	50
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	2	5	48
22	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	5	48
23	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	5	4	3	4	2	45
24	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	5	4	2	53
25	4	4	3	4	4	3	2	3	3	2	2	5	3	4	4	42
26	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	2	4	5	3	4	61
27	2	4	3	2	4	2	3	3	3	2	2	3	5	4	4	46
28	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	5	4	4	2	3	51
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	2	58
30	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	2	3	4	4	5	60
31	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	2	62



32	1	5	3	1	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	2	58
33	2	4	3	3	2	3	3	4	4	4	2	5	3	4	4	50
34	3	5	4	3	3	3	4	5	5	4	5	3	2	4	4	57
35	3	3	3	2	3	2	3	3	1	1	5	4	4	2	3	42
36	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	2	5	57
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	4	4	5	68
38	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	2	62
39	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	3	4	5	4	2	63
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	4	68
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	5	3	2	48
42	4	5	5	3	3	4	4	5	5	5	2	3	5	4	4	61
43	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	2	61
44	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	2	58
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	5	68
46	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	3	4	2	51
47	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	4	3	2	52
48	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	4	51
49	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	2	51
50	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	57
51	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	2	55
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	58
53	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	2	3	3	4	63
54	3	5	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	3	4	2	55
55	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	57
56	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	54
57	5	4	3	5	5	4	4	2	3	2	4	2	3	3	4	53
58	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	47
59	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	2	3	3	4	4	57
60	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	2	51
61	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	57
62	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	48
63	4	4	3	5	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	4	54
64	4	3	2	3	3	3	2	2	3	4	4	3	4	3	2	45

65	3	4	4	5	4	4	5	5	3	4	3	4	4	2	3	57
66	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	48
67	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	54
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	3	3	4	4	57
69	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	53
70	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	2	2	4	54
71	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	2	2	51
72	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	2	52
73	5	4	3	4	5	5	5	3	3	4	2	3	2	2	4	57
74	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4	54
75	4	5	3	5	5	3	4	4	4	4	4	2	3	2	2	57
76	5	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2	2	2	53
77	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	2	3	2	2	64
78	4	4	4	5	5	5	4	4	3	2	2	3	2	2	4	56
79	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	4	2	49
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	4	55
81	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	2	47
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	2	2	55
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	3	2	2	65
84	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	2	3	2	2	4	58
85	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2	4	2	59
86	3	4	4	3	3	3	4	3	4	5	3	2	2	4	2	49
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2	2	4	63
88	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	2	2	51
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	2	2	63
90	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	2	2	51

No. Responden	Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y)										
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
1	3	5	5	4	5	4	2	3	1	2	34
2	4	4	4	4	4	4	1	2	2	3	32
3	5	5	5	4	4	4	3	2	1	2	35
4	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	30
5	4	5	5	4	5	4	2	3	2	1	35
6	4	5	5	4	5	4	1	3	2	2	35
7	4	4	4	4	4	3	2	3	1	2	31
8	5	5	4	5	5	4	1	2	2	3	36
9	4	4	4	4	4	4	3	2	1	2	32
10	5	5	5	4	5	5	2	1	3	2	37
11	5	5	5	5	5	4	2	3	2	1	37
12	4	4	2	4	4	4	1	3	2	2	30
13	4	5	4	5	5	3	2	3	1	2	34
14	4	4	4	4	4	4	1	2	2	3	32
15	4	4	4	3	4	4	2	1	3	2	31
16	3	4	4	3	3	4	2	3	2	1	29
17	5	4	5	5	5	4	1	3	2	2	36
18	4	4	3	4	4	3	2	3	1	2	30
19	4	4	3	3	4	4	1	2	2	3	30
20	4	4	3	3	3	3	3	2	1	2	28
21	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	32
22	4	4	4	4	4	3	2	3	2	1	31
23	4	4	4	4	4	4	1	3	2	2	32
24	3	3	4	4	4	3	2	3	1	2	29

25	5	5	5	5	5	4	1	2	2	3	37
26	4	4	3	4	4	3	3	4	1	2	32
27	5	5	5	5	4	4	2	1	3	4	38
28	2	4	3	2	4	2	4	3	1	2	27
29	3	3	3	3	3	3	1	2	4	3	28
30	4	4	4	4	4	4	3	4	1	2	34
31	4	4	4	5	4	5	2	1	3	4	36
32	5	5	5	4	5	4	4	3	1	2	38
33	1	5	3	1	5	5	1	2	4	3	30
34	2	4	3	3	2	3	3	4	1	2	27
35	3	5	4	3	3	3	4	3	1	2	31
36	3	3	3	2	3	2	1	2	4	3	23
37	5	4	4	4	4	4	3	4	1	2	35
38	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	40
39	4	4	4	4	4	4	4	3	1	2	34
40	4	5	5	4	4	4	1	2	4	3	36
41	5	5	5	5	5	5	3	4	1	2	40
42	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	28
43	4	5	5	3	3	4	4	3	1	2	34
44	5	5	4	4	4	5	1	2	4	3	37
45	4	4	4	5	4	4	3	4	1	2	35
46	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	40
47	4	4	3	3	4	3	4	3	1	2	31
48	4	4	3	3	4	3	3	4	1	2	31
49	4	4	4	4	4	4	2	1	3	4	34
50	4	3	3	4	3	4	4	3	1	2	31
51	4	4	3	3	3	3	1	2	4	3	30
52	4	4	5	3	4	4	2	2	3	3	34

53	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	34
54	4	5	5	4	5	5	3	2	2	3	38
55	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	34
56	5	4	3	5	5	4	3	2	2	3	36
57	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	29
58	5	4	4	5	4	4	2	2	3	3	36
59	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	31
60	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	34
61	4	5	4	5	4	3	3	2	2	3	36
62	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	30
63	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2	28
64	3	4	4	5	4	4	2	3	2	3	34
65	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	29
66	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	34
67	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	34
68	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	34
69	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	32
70	3	4	3	3	4	3	2	2	3	3	30
71	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	34
72	5	4	3	4	5	5	2	3	2	3	36
73	5	5	4	5	4	5	3	4	1	2	38
74	4	4	3	3	4	4	2	1	3	4	32
75	4	5	3	5	5	3	4	3	1	2	35
76	5	4	3	4	4	3	1	2	4	3	33
77	5	4	5	5	5	5	3	4	1	2	39
78	4	4	4	5	5	5	3	4	1	2	37
79	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	28
80	4	4	4	4	4	4	4	3	1	2	34

91	4	3	3	3	3	3	1	2	4	3	29
92	4	4	4	4	4	4	3	4	1	2	34
93	5	5	5	5	5	5	3	4	1	2	40
94	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	40
95	5	5	5	5	5	5	4	3	1	2	40
96	3	4	4	3	3	3	1	2	4	3	30
97	5	5	5	5	5	5	3	4	1	2	40
98	4	4	4	4	4	4	3	4	1	2	34
99	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	40
90	4	4	4	4	4	4	4	3	1	2	34

## Lampiran 4

## OUTPUT SPSS

## 1. Uji Validitas

No	Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa (X1)	X1.1	0,718	0,1975	0,000	Valid
		X1.2	0,774	0,1975	0,000	Valid
		X1.3	0,735	0,1975	0,000	Valid
		X1.4	0,603	0,1975	0,000	Valid
		X1.5	0,792	0,1975	0,000	Valid
		X1.6	0,746	0,1975	0,000	Valid
		X1.7	0,553	0,1975	0,000	Valid
		X1.8	0,706	0,1975	0,000	Valid
		X1.9	0,715	0,1975	0,000	Valid
		X1.10	0,554	0,1975	0,000	Valid
		X1.11	0,718	0,1975	0,000	Valid
		X1.12	0,774	0,1975	0,000	Valid
		X1.13	0,735	0,1975	0,000	Valid
		X1.14	0,603	0,1975	0,000	Valid
		X1.15	0,792	0,1975	0,000	Valid
2	Pemberdayaan Masyarakat (X2)	X2.1	0,739	0,1975	0,000	Valid
		X2.2	0,717	0,1975	0,000	Valid
		X2.3	0,786	0,1975	0,000	Valid
		X2.4	0,796	0,1975	0,000	Valid
		X2.5	0,885	0,1975	0,000	Valid
		X2.6	0,770	0,1975	0,000	Valid
		X2.7	0,757	0,1975	0,000	Valid
		X2.8	0,732	0,1975	0,000	Valid
		X2.9	0,861	0,1975	0,000	Valid
		X2.10	0,830	0,1975	0,000	Valid
		X2.11	0,739	0,1975	0,000	Valid
		X2.12	0,717	0,1975	0,000	Valid
		X2.13	0,786	0,1975	0,000	Valid
		X2.14	0,796	0,1975	0,000	Valid
		X2.15	0,885	0,1975	0,000	Valid
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y.1	0,851	0,1975	0,000	Valid
		Y.2	0,835	0,1975	0,000	Valid
		Y.3	0,864	0,1975	0,000	Valid
		Y.4	0,855	0,1975	0,000	Valid
		Y.5	0,685	0,1975	0,000	Valid
		Y.6	0,829	0,1975	0,000	Valid
		Y.7	0,851	0,1975	0,000	Valid
		Y.8	0,835	0,1975	0,000	Valid
		Y.9	0,864	0,1975	0,000	Valid
		Y.10	0,855	0,1975	0,000	Valid







X2.13	Pearson Correlation	,420 <sup>†</sup>	,519 <sup>†</sup>	,515 <sup>†</sup>	,223 <sup>†</sup>	,557 <sup>†</sup>	,490 <sup>**</sup>	,333 <sup>†</sup>	,420 <sup>†</sup>	,519 <sup>†</sup>	,515 <sup>**</sup>	,223 <sup>†</sup>	,557 <sup>**</sup>	1	,466 <sup>**</sup>	,584 <sup>**</sup>	,786 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.14	Pearson Correlation	,584 <sup>†</sup>	,350 <sup>†</sup>	,558 <sup>†</sup>	,570 <sup>†</sup>	,384 <sup>†</sup>	,400 <sup>**</sup>	,535 <sup>†</sup>	,376 <sup>†</sup>	,584 <sup>†</sup>	,350 <sup>**</sup>	,558 <sup>**</sup>	,570 <sup>**</sup>	,384 <sup>**</sup>	1	,589 <sup>**</sup>	,796 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.15	Pearson Correlation	,589 <sup>†</sup>	,466 <sup>†</sup>	,456 <sup>†</sup>	,591 <sup>†</sup>	,424 <sup>†</sup>	,234 <sup>†</sup>	,465 <sup>†</sup>	,490 <sup>†</sup>	,298 <sup>†</sup>	,589 <sup>**</sup>	,466 <sup>**</sup>	,456 <sup>**</sup>	,591 <sup>**</sup>	,424 <sup>**</sup>	1	,885 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
L	TO Pearson Correlation	739 <sup>†</sup>	717 <sup>†</sup>	786 <sup>†</sup>	796 <sup>†</sup>	885 <sup>†</sup>	770 <sup>†</sup>	757 <sup>†</sup>	732 <sup>†</sup>	861 <sup>†</sup>	830 <sup>†</sup>	739 <sup>†</sup>	717 <sup>†</sup>	786 <sup>†</sup>	796 <sup>†</sup>	885 <sup>†</sup>		
	TA Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	L	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlatios										Servis Excellent	
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10		
Y.1	Pearson Correlation	1	,647 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	,641 <sup>**</sup>	,647 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	,851 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.2	Pearson Correlation	,647 <sup>**</sup>	1	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,835 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.3	Pearson Correlation	,686 <sup>**</sup>	,741 <sup>**</sup>	1	,710 <sup>**</sup>	,528 <sup>**</sup>	,590 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,741 <sup>**</sup>	,710 <sup>**</sup>	,528 <sup>**</sup>	,864 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.4	Pearson Correlation	,637 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,710 <sup>**</sup>	1	,430 <sup>**</sup>	,719 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,710 <sup>**</sup>	,430 <sup>**</sup>	,855 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.5	Pearson Correlation	,580 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,528 <sup>**</sup>	,430 <sup>**</sup>	1	,519 <sup>**</sup>	,296 <sup>**</sup>	,634 <sup>**</sup>	,430 <sup>**</sup>	,228 <sup>**</sup>	,685 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.6	Pearson Correlation	,641 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,590 <sup>**</sup>	,719 <sup>**</sup>	,519 <sup>**</sup>	1	,641 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,590 <sup>**</sup>	,719 <sup>**</sup>	,829 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.7	Pearson Correlation	,647 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	,641 <sup>**</sup>	,647 <sup>**</sup>	1	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	,851 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.8	Pearson Correlation	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	1	,637 <sup>**</sup>	,647 <sup>**</sup>	,835 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.9	Pearson Correlation	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,741 <sup>**</sup>	,638 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	1	,647 <sup>**</sup>	,864 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Y.10	Pearson Correlation	,647 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	,641 <sup>**</sup>	,647 <sup>**</sup>	,686 <sup>**</sup>	,637 <sup>**</sup>	,580 <sup>**</sup>	1	,855 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	TO Pearson Correlation	,851 <sup>**</sup>	,835 <sup>**</sup>	,864 <sup>**</sup>	,855 <sup>**</sup>	,685 <sup>**</sup>	,829 <sup>**</sup>	,851 <sup>**</sup>	,835 <sup>**</sup>	,864 <sup>**</sup>	,855 <sup>**</sup>		1
TA Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
L	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Uji Reliability

### a. Reliability Variabel (X1) Alokasi Dana Desa

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.882	15

### b. Reliability Variabel (X2) Pemberdayaan Masyarakat

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

b. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	15

### c. Reliability Variabel (Y) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	10

F Tabel

Fr	3.902	3.112	2.720	2.401	2.330	2.210	2.120	2.030
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034

Titik Persentase Distribusi t

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Pengisian Kuesioner Oleh Responden



Pengisian Kuesioner Oleh Responden



**Pengisian Kuesioner Oleh Responden**



**Pengisian Kuesioner Oleh Responden**



**Pengisian Kuesioner Oleh Responden**



**Pengisian Kuesioner Oleh Responden**



### Pengisian Kuesioner Oleh Responden



Bersama Aparat Desa Mattampapole





## Lampiran 6


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 34758/05/C.4-VIII/X/43/2024 02 Rabiul Akhir 1446 H  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 05 October 2024 M  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel  
 di –  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 76/05/A.2-II/X/46/2024 tanggal 3 Oktober 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LISNAYANTI  
 No. Stambuk : 10572 111920  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Manajemen  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mattampapole"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Nopember 2023 s/d 7 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Ketua LP3M,

  
**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.**  
 NBM 101 7716

10-24



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros  
email : [admin@dpmtsp.maroskab.go.id](mailto:admin@dpmtsp.maroskab.go.id) Website : [www.dpmtsp.maroskab.go.id](http://www.dpmtsp.maroskab.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 419/X/IP/DPMTSP/2024

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 489/X/REK-IP/DPMTSP/2024

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : LISNAYANTI  
 Nomor Pokok : 105721117920  
 Tempat/Tgl.Lahir : MAROS / 11 Januari 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : MAHASISWA  
 Alamat : DUSUN BULU - BULU DESA MATTAMPA POLE,  
 KEC. MALLAWA  
 Tempat Meneliti : DESA MATTAMPAPOLE

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA  
MATTAMPAPOLE”**

Lamanya Penelitian : 09 Oktober 2024 s/d 08 November 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 09 Oktober 2024

**KEPALA DINAS,**



**NURYADI, S. Sos., M. A. P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip

*Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik  
iQENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN MALLAWA  
DESA MATTAMPAPOLE**

Alamat : Jl. Bulu-bulu Kec. Mallawa No. 2 Kp 90563 Telp (0411)7770113

Nomor : 005/12/MTP/XI/2024 **Kepada**  
 Lampiran : - Yth. Bpk Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Perihal : Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar  
**Di-**  
**Makassar**

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 489/X/REK-IP/DPMP/TSP/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, Perihal Izin Penelitian. Dengan ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : LISNAYANTI  
 Tempat/Tgl Lahir : Maros, 11 Januari 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa ( S1 ) UNISMUH Makassar

**“ PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI DESA  
 MATTAMPAPOLE ”**

Yang akan dilaksanakan : 09 Oktober 2024 s/d 08 November 2024  
 Peserta : 1 Orang

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipergunakan dan seperlunya.

Mattampapole, 5 November 2024

Pj Kepala Desa Mattampapole



**MUALLIM.S.Sos**  
 Nip : 19720807 201412 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Maros di Maros
2. Pimpinan Lembaga/Perusahaan/Instansi Lokasi Penelitian
3. Peninggal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Lisnayanti  
Nim : 105721117920  
Program Studi: Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	3 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Januari 2025  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



# BAB I Lisnayanti 105721117920

by Tahap Tutup

**Submission date:** 31-Dec-2024 09:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558974598

**File name:** BAB\_I\_1.docx (24.96K)

**Word count:** 2028

**Character count:** 13854

BAB I Lisnayanti 105721117920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Student Paper

2%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



# BAB II Lisnayanti 105721117920

by Tahap Tutup

**Submission date:** 31-Dec-2024 09:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558974742

**File name:** BAB\_II\_1.docx (81.3K)

**Word count:** 8334

**Character count:** 58392

BAB II Lisnayanti 105721117920

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



Exclude quotes Off Exclude matches 2%  
Exclude bibliography Off







# BAB III Lisnayanti

105721117920

by Tahap Tutup

**Submission date:** 31-Dec-2024 09:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558974855

**File name:** BAB\_III-1.docx (75.27K)

**Word count:** 1989

**Character count:** 12678

BAB III Lisnayanti 105721117920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source

2%

2

repositori.ar-raniry.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%





**Submission date:** 31-Dec-2024 09:21AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558974966

**File name:** BAB\_IV\_1.docx (131.97K)

**Word count:** 6134

**Character count:** 37559

BAB IV Lisnayanti 105721117920

ORIGINALITY REPORT

<b>0%</b>	<b>LULUS</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS	

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



# BAB V Lisnayanti 105721117920

by Tahap Tutup



**Submission date:** 31-Dec-2024 09:22AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558975043

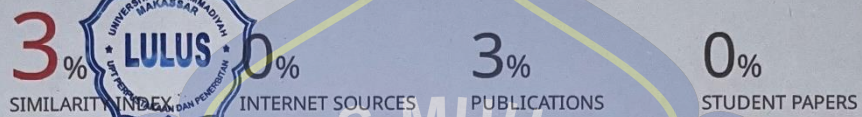
**File name:** BAB\_V\_1.docx (22.43K)

**Word count:** 339

**Character count:** 2195

BAB V Lisnayanti 105721117920

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1 Benna Fransiska, Afrizal Nilwan. "Pengaruh Likuiditas, Perputaran Modal Kerja, dan Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan BUMN Non-Perbankan Yang Terdaftar di BEI", Jurnal EMT KITA, 2023  
Publication 3%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off  
Exclude matches < 2%

## BIOGRAFI PENULIS



Lisnayanti, panggilan Lisna lahir di Maros pada tanggal 11 Januari 2003 dari pasangan suami istri Bapak Hajar dan Ibu Nurlina. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sukaria Raya No.10, Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Tunas Muda dan lulus pada tahun 2008, SDN 27 Bulu-Bulu lulus pada tahun 2014, SMP Negeri 8 Mallawa lulus pada tahun 2017, SMA Negeri 7 Maros lulus pada tahun 2020 dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.